KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

MAJALAH • MAHASISWA • UNS

SUKSESI 1998 SUATU PERSPEKTIF

REKTOR HARAPAN KAMI

EDISI 01 / JULI / 1994

Ya! Ada yang jaya, ada yang terhina :
Ada yang bersenjata, ada yang terluka.
Ada yang duduk, ada yang diduduki.
Ada yang berlimpah, ada yang terkuras.
Dan kita disini bertanya :
"Maksud baik Saudara untuk siapa ?
Saudara berdiri dipihak yang mana ?"

(Dari Sajak Pertemuan Mahasiswa, Rendra)

SURAT REDAKSI

Para mahasiswa UNS sebelum angkatan tahun 1990 **mungkin** sempat melihat peluncuran perdana majalah mahasiswa KOMPONEN, yang setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak akan pernah lagi menampakkan dirinya. Sejak itulah kita semua kembali mendambakan hadirnya sebuah penerbitan mahasiswa tingkat universitas.

Bagaimanapun kegagalan KOMPONEN tersebut telah jadi pelajaran tersendiri ketika sejumlah aktifis pers mahasiswa dari pelba gai fakultas yang ada di UNS kembali mengupayakan berdirinya penerbitan universitas dengan membentuk Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Antar Fakultas pada Desember 1992.

Sebagian dari Wadya Bala Kentingan

Akhirnya perjalanan panjang yang melelahkan berbuah juga dengan terbentuknya kepengurusan Lembaga Penerbitan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (LPM UNS) pada candra kedua tahun 1994. Bagaimanapun kami tidak dapat melupakan dukungan yang telah diberikan para aktifis penerbitan mahasiswa yang ada di UNS.

Lantas, kenapa harus KENTINGAN yang kami pilih untuk menamai majalah ini? Ada beberapa alasan, namun yang mendasar adalah kami berharap bahwa kita sebagai mahasiswa Universitas Sebelas Maret akan selalu mengingat bumi tempat kita menempa diri dan mendapatkan segenap pengalaman. Tanpa menampikkan keberadaan kampus UNS lainnya, seperti Pabelan, Manahan, dan Kebumen, kami berharap KENTINGAN dapat merefleksikan keberadaan kampus kita tercinta.

Bagaimanapun melayani banyak kepentingan dengan sebuah tim besar bukan pekerjaan gampang. Terlebih dalam sebuah masyarakat akademis seperti ini. Namun betapapun hal itu tidak dapat memaksa kami surut. Lahir sebagai suatu senyawa yang utuh dalam ide, visi dan misi, kami tidak membiarkan tumbuhnya faksi-faksi dalam tubuh kami.

Akhirnya inilah karya perdana yang dapat kami persembahkan kehadapan sidang pembaca sekalian. Sebagai lembaga penerbitan yang memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu sajian, tentu saja kami sangat mengharapkan masuknya kritik dan saran dari Anda. Semoga obsesi menjadikan KENTINGAN sebagai wadah dan media yang independen, kritis dan mampu menampung segenap aspirasi dan idealisme mahasiswa bukan lagi angan belaka. Dan ini butuh dukungan bersama. Jadi ... kenapa tidak dimulai dari sekarang saja. (**)

Redaksi

KENTINGAN

Diterbitkan oleh : Lembaga Penerbitan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (LPM UNS) • **Pelindung** : Rektor Universitas Sebelas Maret . Penasehat: Pembantu Rektor III Universitas Sebelas Maret, DR. Andrik Purwasito, Drs. Anto Suranto • **Pemimpin Umum** : Moh. Ridlo • **Pemimpin Redaksi** : Budi Nugroho Sw • **Pemimpin Litbang** : Agus Priyono • **Pemimpin Perusahaan** : Kresna Wijaya • **Sekretaris Umum** : Suwarto Barkah • **Bendahara Umum** : Nurul Hidayah • **Sekretaris Redaksi** : Rita Ardyanti • **Wakil Pemimpin Redaksi** : Mahfudin • **Dewan Redaksi** : Ali Rustamaji, Nanang BS, Edy Darmoyo, Hening Purwati, Wiharti, Budiyanto • **Reporter** : Tofik Gunawan, Haris Budi, Achmad Budi S., Julius Umboro, Ulin Ni'am, Nurul Hidayati, Robiatul Adawiyah, Makarti Rahayu • **Artistik** : Arena Yudi Suryawan, Basnendar H, Suharyanto, Agus Z. Idris • **Riset Foto** :Wahyu Daryono, Rachmi Fauziah • **Diklat** : Heri Purnama, Imam Adi Kurniawan, Kristianto Martono • **Penelitian** : Erlina, Anik Dwi H., Wg. Budi • **Humas** : Komaeroh, Tri Sp • **Dana** : Bambang Dwi P. • **Pemasaran** : Susanti, Joko Budi • **Biro Umum** : Sri Wahyuni • **Alamat** : SM UNS Gd. Rektorat Lt. I Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Telp (0271) 46994

Redaksi menerima tulisan dan foto yang sesuai dengan isi dan misi majalah ini. Redaksi berhak mengubah tulisan sebatas tidak mengubah isi dan maknanya. Kiriman tulisan hendaknya diketik rapi dengan spasi ganda. Tulisan dan foto yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai alamat dan perangko secukupnya.

SAJIAN

FOKUS UTAMA 9

Di tengah ramainya berbagai diskusi, suksesi kepemimpinan nasional tetap pantas digelindingkan. Terlebih untuk mematangkan dan mengkondisikan masyarakat pada suksesi yang banyak pengamat diyakini bakal terjadi tahun 1998.

KENTRUNG 20

Dengan predikat kota budaya dan pariwisata, lengkap dengan dua keraton peninggalan kerajaan mataram, penanganan dan perhatian terhadap berbagai warisan budaya yang bernilai sejarah tinggi terasa mengenaskan. Komitmen setengah hati pemerintah daerah yang digelayuti rangsangan ekonomi tampaknya masih harus didukung semua kalangan masyarakat.

SWARA MEREKA 6

EDITORIAL 8

ARTIKEL UTAMA 15

APRESIASI 25

SENTILAN 28

BIDIK 29

KOLOM 37 52

SAJIAN

41 FIGUR

44 54 OPINI

48 SEKITAR KITA

56 LINTAS KAMPUS

58 UNIKDOT

Kredit Foto: Budi Nug, Basnendar, Adi Nugroho Humas UNS, Tempo, Detik, Editor, Kompas,

KULIT MUKA : BASNENDAR H

FOKUS KHUSUS 33

Bagaimana sebenarnya harapan mahasiswa UNS terhadap proses pemilihan Rektornya . Setelah merayakan Dies Natalis ke 18 masih perlukah UNS dipimpin "orang luar"? Apakah tidak ada "orang dalam" yang cukup memenuhi klasifikasi untuk memimpin Universitas Negeri muda ini?

SERAMBI 26

Mahasiswi Jepang mempelajari sejarah Jawa ini mengaku betah tinggal di Solo, terlebih lagi ia berharap menemukan cowok ideal yang punya tipe seperti Ken Arok.

SWARA MEREKA

BOBOT ILMIAH PLUS HUMAN INTEREST

Kami merasa sangat gembira dan bangga dengan lahirnya maja lah Universitas Sebelas Maret "KENTINGAN" yang sudah lama dinantinantikan. Penerbitan yang sudah tentu ikut menyemarakkan media komunikasi yang telah banyak terbit ditiap-tiap fakultas maupun jurusan/ program studi.

Penerbitan majalah sebagai suatu sarana didalam sebuah Universitas adalah mutlak perlu dalam arti sangat dibutuhkan. Sebagai majalah khusus kampus, ia diharapkan mempunyai porsi bobot ilmiah lebih dari majalah-majalah umum, walaupun dapat juga berisi hal-hal lain yang dikemas secara manis, etis dengan bumbu- bumbu human interest.

Masalah konvensional yang sering dihadapi adalah kontinuitas terbit dan pengadaan dana. Mengenai hal itu hendaknya pengelola sudah siap dengan kiat-kiat pengatasannya sebagai latihan pengembangan minat dan bakat dibidang pers umum, dan pers kampus khususnya.

Semoga dengan terbitnya majalah "KENTINGAN" ini dapatlah direalisasikan akselerasi perkembangan pers mahasiswa dalam mendukung peningkatan pengembangan UNS dalam melaksanakan Tri Dharmanya.

Rektor UNS
Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo

PERPUSTAKAANKU YANG MALANG

Kemunduran perpustakaan pusat UNS bukan semata-mata kesalahan dari Buku Pegangan Kuliah, tapi dapat dilihat dari beberapa faktor , diantaranya:

-Koleksi buku-buku ilmu pengetahuan yang berkembang, seharusnya mengikuti perkembangan zaman sehingga peran perpustakaan sebagai pustaka mahasiswa dapat benar-benar terperan.

-Menambah jam layanan pada waktu-waktu senggang mahasiswa menjadikan mahasiswa yang suka usil buka buku dapat memanfaatkan peran perpustakaan.

Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan pengunjung perpus, perlu kiranya direhab penampilan yang monoton dan perlu juga untuk mahasiswa menjadikan perpus sebagai student center atau ajang diskusi-diskusi kecil dengan permasalahan bebas.

Mahasiswa Faperta '93

BRAVO UNTUK AKSI MAHASISWA

Aksi Mahasiswa merupakan sebuah sarana untuk mengemukakan segala uneg-uneg yang ada dihati dan diotak. Mahasiswa sebagai civitas akademika tetap tidak bisa lepas dari sosok yang bertanggung jawab, demokratis dan jiwa yang optimis. Adanya beberapa aksi mahasiswa belakangan ini tidak seharusnya ditanggapi pihak berwenang dengan kekerasan yang diiringi ketakutan. Justru sebaliknya, angkat jempol. Ternyata mahasiswa bukan sosok individual yang cuma seorang kutu BPK, bisu dan cuek dengan lingkungan namun sosok muda dengan kepedulian sosial full. Biarpun dilain pihak, memang benar, AKSI bukanlah satu-satunya penyelesaian yang terbaik dan menyelesaikan masalah.

Nama & Alamat pada redaksi

MARU SEBAGAI CENDEKIA MUDA

Kegiatan OSPEK atau juga kemah keakraban merupakan suatu proses yang senantiasa dialami oleh mahasiswa baru. Di dalamnya ada rintihan, kebosanan dan senyum kebahagiaan. Berhasil tidaknya proses ini sangat berpengaruh pada kader yang diproses.

Kegiatan ini merupakan sebuah proses yang menghantarkan dan menghubungkan maru yang eks SMA dengan sosok cendekia muda. Secara umum, proses ini sangat perlu bagi perkembangan psikologi tapi secara

khusus banyak penyelewengan yang terjadi, seperti ospek yang menekan jiwa, jadi ajang mencari pamor para senior dan pelecehan atak kepolosan mantan anak SMA.

Harus kegiatan difokuskan pada bentuk yang mengetes kepedulian sosial, yang merangsang respon. Gojlokan memang perlu tapi penumbuhan kreatifitas juga ngga kalah penting, yang tidak sebatas pada nyanyi atau main sandiwara, tapi belajar untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Misalnya dengan memberikan mimbar bebas. Pola ospek dari tahun ke tahun tidak harus sama kan? Kreatiflah dan biar ngga mudah ditebak maru.

Eks Maru '93 yang prihatin
Nama & Alamat pada redaksi

KRITIS DAN ILMIAH

Selamat atas terbitnya majalah Kentingan, semoga mampu memainkan fungsi dan peran pers mahasiswa sebagaimana mestinya.

Bersikap kritis dan ilmiah dalam penyampaian informasi. Lestarikan nilai-nilai perjuangan dan hadapi segala rintangan.

Jayalah pers mahasiswa!!!

Rommy Fibri
Sekjen PPMI

"Reaksi" Sipil Unhas ngucapin selamat dan sukses atas terbitnya edisi perdana Kentingan, moga-moga bukan edisi pertama dan terakhir.

Gerombolan Redaksi REAKSI
SIPIL UNHAS

Selamat dan sukses atas usaha untuk menerbitkan Kentingan. Semoga dapat terus tumbuh berbunga dan harum baunya.

Widya Arwien Dianta
FPBS Kampus Ketintang IKIP
Surabaya

LELAYU

Innalillahi Wa Inna Illaihi Rajiun

Turut berduka cita sedalam-dalamnya

Atas pembungkaman yang menimpa saudara tua :

TEMPO - EDITOR - DETIK

Semoga kami semua yang ditinggalkan diberiNya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka.

Redaksi
Majalah Mahasiswa UNS
KENTINGAN

OBITUARI

5 Juni 1994

Malam yang hitam
Menjemput pulang Innalillaahi wa inna ilaihi roji'uun

Selamat jalan kawan
Semoga kau tenang dalam
tidur panjangmu

doa kami untukmu

BUDIYANTO

Yang berduka cita
keluarga besar LPM UNS - Kentingan

BELAJAR SEJARAH

Ada yang naik dan turun. Karena bumi dan roda masih akan terus berputar. Tapi masalahnya selalu tak semudah memutar roda kemudi. Ada banyak tabu, ada banyak daerah tertutup, ada selalu orang yang tak suka bicara terbuka. Ada banyak kepentingan dipertentangkan.

Berawal lima tahun silam, isu suksesi terus menggelinding. Berbagai penafsiran pun kerap bermunculan tiap kali Presiden Soeharto, selaku orang yang menjadi fokus pembicaraan suksesi, mengeluarkan pernyataan yang lebih sepatah-patah dan selalu menyiratkan makna lain. Bicaranya sering ditafsirkan sebagai sebuah bahasa isyarat yang ampuh untuk membuka atau menengahi polemik yang tengah berkembang di masyarakat.

Teori *Satrio Piningit* (putra mahkota yang masih disembunyi kan) Juni lalu kembali merebak setelah Presiden Soeharto mengung kapkan dalam suatu pertemuan di Tapos, Bogor, bahwa jika presiden berhalangan maka wakil presiden otomatis menjadi presiden. Rasionalisasi yang wajar dan konstitusional karena memang demikian adanya tercantum dalam UUD 45. Namun yang perlu diingat disini adalah bahwa wakil presiden melanjutkan tugas-tugas presiden yang berhalangan tersebut hanya sampai akhir periode.

Sebelumnya, melanjuti konsep *satrio piningit* Ketua Soksi *Suhardiman* sampai mengibaratkan suksesi bak melahirkan bayi yang berarti ada suasana krisis dan perdarahan. Kekhawatiran semacam ini memang wajar bila melihat munculnya berbagai macam skenario politik yang menggambarkan proses kedua suksesi kepemimpinan nasional republik ini. Ini semata kecemasan akibatnya minimnya pengalaman suksesi yang damai dan konstitusional.

Cukup ironis memang. Selama hampir 49 tahun sejarah republik ini kita selalu tergantung pada dominasi kharisma dua orang pemimpin, *Soekarno* dan *Soeharto*. Padahal dominasi seorang pemimpin negara bisa berakibat mengaburnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana pernah terjadi dalam 20 tahun pertama kemerdekaan kita. Namun, entah mengapa, kita seolah tak pernah belajar dari sejarah sehingga ketergantungan terhadap kharisma seorang pemimpin besar pun terulang lagi dalam tiga dasawarsa terakhir ini.

Bagaimanapun dapat dimengerti bersama bila pada permulaan berdirinya Orde Baru kita masih berada dalam kondisi *traumatis* yang cukup parah, sehingga seolah kita ingin 'membalas' apa yang tidak pernah tercapai dalam orde sebelumnya. Seperti stabilitas politik, kehidupan ekonomi yang membaik, pembangunan yang berjalan, pendidikan yang baik dan sebagainya.

Sehingga wajar jika dalam periode awal Orde Baru kita masih enggan membicarakan suksesi, disamping adanya perasaan kurang santun dan kurang enak, banyak orang yang masih ingin menikmati hidup tenang dan nyaman. Namun setelah lima periode kepemimpinan nasional berlalu dengan orang yang sama, kita masih juga berada dalam realitas politik yang enggan membicarakan suksesi secara terbuka. Disamping ironis, ini jelas merupakan fenomen politik yang unik bagi sebuah negeri yang mengaku menganut Demokrasi Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegaranya.

Padahal sistem dan mekanisme suksesi sudah tersedia sejak 20 tahun lalu. Terlepas dari perdebatan yang ada didalamnya, Tap MPR No. II/ 1973 telah mengatur pemilihan presiden dan wakilnya. Meski mekanisme tersebut belum teruji dalam proses suksesi figur pemimpin nasional kita karena perangkat aturan itu hanya diguna kan untuk memperpanjang posisi Soeharto sebagai presiden.

Setidaknya, kenapa kita tidak sedikit belajar dari sejarah bangsa sendiri, melihat pelbagai akibat ketergantungan bangsa ini hanya pada pemimpin besarnya yang kharismatik. Kenapa tidak mendiskusikan suksesi yang damai dan tanpa setetes darah pun, sebagaimana yang sudah sering dilakukan untuk tingkat-tingkat kepemimpinan dibawah. (**)

SUKSESI 1998 : SUATU PERSPEKTIF

Dalam dinamika kehidupan politik Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, seharusnya masalah suksesi kepemimpinan nasional merupakan soal yang biasa dan alamiah. Namun karena nyaris tidak adanya pengalaman pergantian kekuasaan nasional dalam catatan sejarah negeri ini, maka persoalan suksesi di Indonesia -menurut Amir Santoso- "Masih belum terbuka, padahal hal itu merupakan elemen terpenting dalam menumbuhkan iklim kehidupan demokrasi di Indonesia".

Alasan mendasar kenapa kita harus membicarakan persoalan suksesi ini karena keterbukaan kita memperbincangkan hal itu akan membedakannya dengan sistem politik yang otoritarian, bukan karena kita bersikap anti atau oposisi terhadap mereka yang saat ini memegang status quo negeri yang hampir genap berumur setengah abad, juga bukan karena maksud negatif lainnya.

Tujuan sesungguhnya adalah untuk membahas banyak hal yang berkaitan dengan masalah : mengapa perlu ada pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional, apa kaitan prosedur tersebut dengan demokrasi dan mengapa hingga kini kita belum sempat melaksanakannya.

FOKUS UTAMA

KATA SUKSESI, yang berasal dari bahasa Inggris *succession*, kali pertama ramai dibicarakan di bulan April 1989. Waktu itu baru genap setahun Soeharto dilantik sebagai presiden republik ini untuk kelima kalinya. Awalnya adalah ketika *Sudomo*, pejabat bermasalah yang ketika itu menjabat Menko Polkam, melontarkan perlunya disiapkan konsesus nasional untuk menghadapi Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993, seandainya muncul lebih dari satu orang calon presiden.

Meski kemudian Sudomo meminta maaf kepada Presiden atas ucapannya tersebut, namun tak urung lontaran itu telah membangkitkan diskusi hangat seputar spekulasi yang banyak berkembang bahwa Pak Harto bakal tak bersedia lagi dicalonkan sebagai presi den pada SU MPR 1993. Dan yang terbukti justru Pak Harto kembali menjadi calon tunggal yang secara aklamasi bulat terpilih kembali menjadi presiden RI sampai 1998.

Sejak itulah suksesi menjadi santapan menarik pelbagai forum diskusi, baik yang dilakukan secara ilmiah-formal sampai yang diobrolkan santai diwarung kopi, meski inti persoalan dari suksesi itu sendiri sampai saat ini pun tidak banyak beranjak.

Artinya kita lebih sering membahas etis tidaknya suatu proses suksesi diperbincangkan, dari pada kita persiapkan segala sesuatunya secara dewasa. Atas pertimbangan etis pula ketika Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun lalu akhirnya menolak usulan Dr. Amien Rais tentang rumusan kriteria untuk suksesi 1998.

Pendapat sopan santun politik yang menganggap tidak etis dan terlalu dini membicarakan suksesi ketika pemimpin yang ada masih mengemban amanat MPR, sebagian besar berasal dari kalangan peja bat, diantaranya Menko Polkam Soesilo Soedarman dan Menpen Harmo ko. Namun Kapuspen ABRI *Brigjen Syarwan Hamid*, yang khusus berbicara dengan wewenang Pangab Jendral Feisal Tanjung, justru menganggap wajar, bisa dan boleh saja membicarakan masalah suksesi.

"Asalkan sesuai aturan," tambahnya. Menurut jendral bintang satu tersebut soal suksesi justru tidak hanya dipersiapkan sekarang dan perkara etis tidaknya tergantung dari cara membicarakannya. Lanjutnya, "Saya kira sepanjang waktu harus kita persiapkan. Tapi soal suksesi kepemimpinan nasional sudah ada lembaga yang bertugas mengaturnya".

Presiden Soeharto di depan SU MPR. Pertanggungjawabannya dianggap formalitas belaka

Sementara *Amien Rais* menganggap bukan berarti kita *ngege mongso* ingin mendesak-desakkan sesuatu yang belum waktunya jika soal kepemimpinan nasional digelindingkan sejak dini. Dalam wawancaranya dengan *Detik*, ia berpendapat "Saya yakin kalau ada dialog nasional yang terbuka, transparan, jujur dan demokratis, pasti akan muncul pemimpin yang paling bisa diterima semua pihak. Apakah namanya Habibie, Megawati, Rudini, Emil Salim, Try atau Harmoko itu terserah. Asal lewat dialog nasional yang panjang. Jadi kita jangan fanatik pada seseorang".

Dalam pertemuan dengan *Kentingan*, *Dr. Arief Budiman* mengatakan bahwa memang sudah saatnya suksesi dibicarakan secara terbuka karena kepemimpinan nasional yang sekarang pada 1998 nanti telah lebih dari 30 tahun memegang tampuk kekuasaan.

"Orang akan bosan apabila satu orang pimpinan menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama. Sehingga wajar apabila orang menginginkan adanya perubahan sosial," ujar dosen pasca sarjana UKSW tersebut. Namun ditambahkannya, "Masih sulit memproyeksikan suksesi tahun 1998 nanti. Minimal satu setengah tahun mendatang baru bisa dilihat jelas".

Amien Rais juga mengedepankan kemungkinan yang terjadi bila suatu elite terlalu lama berkuasa, seperti lahirnya kultus individu sebagai akibat rasa hormat dan cinta yang berlebihan serta tidak berani menoleh figur lain. Bila suatu kelompok elite terlalu lama memerintah juga akan terjadi penumpulan visi dan kreatifitas serta akan me-

nyakini dirinya sebagai personifikasi stabilitas dan eksistensi negara.

Jendral (Purn) Soemitro juga menegaskan perlu bangsa Indonesia bersikap rasional dan realistis, artinya bila bicara tentang kekuasaan maka harus ada batasnya, untuk membedakan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

"Kearifan seorang pemimpin saja tidak cukup. *Wisdom* tidak bisa diharapkan terutama bagi negara berkembang. Karena kekuasaan memiliki kecenderungan semakin kuat semakin membesar," tegasnya pada *Editor*.

Sedikit berbeda dengan Arief Budiman, pangamat politik FISIP UI *Dr. Amir Santoso* mengatakan bahwa jangan menganggap semua persoalan besar bisa diselesaikan dengan mengganti kepemimpinan nasional. Menurutnya, "Memang betul presiden merupakan penanggung jawab jalannya pemerintahan, tapi ada betul asumsi bahwa semua persoalan itu, seperti dibidang ekonomi, sosial dan administrasi negara, penyebabnya satu orang itu saja. Juga apakah kalau presiden diganti maka semua kelemahan akan bisa diselesaikan. Sebab bisa jadi penggantinya jsutru tidak bisa menyelesaikan persoalan".

"Jadi menurut saya, kita tidak boleh menjadikan masalah suksesi sebagai satu-satunya faktor untuk menuju pada perubahan sosial. Tapi harus juga diperhitungkan faktor-faktor lain," jelas Amir pada *Kentingan*.

Mengingat pengalaman historis, Indonesia memang baru sekali mengalami suksesi kepemimpinan nasional yaitu dari Bung Karno ke Soeharto. Banyak kalangan yang *was-was* karena memperhitungkan pengalaman yang minim itu dalam mempersiapkan suksesi yang matang dan demokratis. Mengutip pendapat Amir Santoso, bahwa setiap bangsa memang harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan suksesi dan Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki pengalaman itu. "Karenanya perlu persiapan untuk melaksanakan suksesi secara damai. Tegasnya perlu kehati-hatian," katanya.

Menyambung pendapat perlu-

Suasana Sidang Umum MPR, 60% anggotanya diangkat pemerintah

nya kewaspadaan tersebut, menurut *Ariel Heryanto* justru tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan suksesi di Indonesia akan mengalami hal-hal besar, seperti revolusi misalnya. Tambahnya, "Apa yang terjadi di tahun 65-66 itu memang sudah terlihat dari semula, bahwa ada ancaman. Kalau masa sekarang saya tidak melihat alasan untuk itu".

Sementara itu Amien Rais mengungkap adanya 3 mashab yang berkembang saat ini mengenai suksesi. *Pertama*, mashab yang tidak percaya akan ada suksesi pada tahun 1998 dengan alasan utama kondisi fisik Soeharto yang masih mungkin untuk terus berkuasa sampai tahun 2003. *Kedua*, mashab yang percaya suksesi akan terja di pada 1998 secara konstitusional dan damai. *Terakhir*, mashab yang berharap agar suksesi terjadi sebelum tahun 1998, dengan alasan konstitusi yang memungkinkan terjadi hal itu lewat sidang umum istimewa MPR.

"Soalnya kita tidak bisa mencari kemungkinan lain diluar ketiga itu," tegasnya pada *Detik*.

Ketiga mashab yang dikemukakan Amien memang skenario suksesi yang konstitusional, yang masih mendasarkan proses terjadinya suksesi berada dalam jalur mekanisme yuridis formal. Presiden Soeharto sendiri juga sudah mengemukakan tidak perlu mempermasalahkan suksesi karena sistem dan mekanismenya sudah ada dan mantap, yaitu Tap MPR No. II/ 1973. Ketetapan MPR tersebut memang boleh dibilang sudah mantap karena selama ini juga sudah digunakan untuk lima kali pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden.

Apalagi bagi *Arbi Sanit* perangkat suksesi itu merupakan produk MPR yang kurang *representatif*, dimana anggota MPR yang dipilih rakyat hanya 40 % sedang sisanya 60 % diangkat pemerintah. Hal itu masih ditambah lagi dengan sistem pemilihan yang 40 % tersebut

sudah diatur sedemikian rupa sehingga kurang menggambarkan kondisi perwakilan yang sesungguhnya. "Ka- re- nya mekanisme suksesi yang ...ah ada sekarang memang riskan," ...s Arbi pada *Editor*.

Pengamat Politik UI tersebut ...ga meyakini model suksesi kepe- ...impinan nasional mendatang akan ...nentukan pembaharuan format ...olitik. Meski reformasi itu masih ...arus ditentukan oleh berbagai ...mungkinan, seperti keterlibatan Presiden Soeharto, dukungan masyarakat pada pemimpin sipil, imbangnya kekuatan kelompok-kelompok militer fanatik dan moderat terhadap dwi fungsi ABRI, serta meningkatnya kemampuan partai politik.

Arbi juga membuat analisa tentang skenario suksesi mendatang yang prosesnya digantungakan pada satu orang dan masih mengandaikan dominasi kekuatan kharismatik Soeharto sebagai pembimbing suksesi yang aman. *Pertama*, skenario yang aman menuju masyarakat sipil dimana Soeharto memberi peran aktif untuk merancang dan melaksanakannya. *Kedua*, suksesi yang aman tapi tetap dibawah dominasi militer, yang mana kelompok militer moderatlah yang menerima tongkat estafetnya. Presiden Soeharto dalam skenario kedua ini masih berperan untuk mengamankan dan mempertemukan kelompok-kelompok militer.

Skenario *ketiga* adalah suksesi yang tidak aman karena Presiden Soeharto berhalangan mengambil bagian, dimana kelompok militer moderat akan bekerja sama dengan pimpinan sipil. *Keempat* adalah skenario suksesi yang berlangsung tidak aman untuk mempertahankan dominasi kekuatan militer, dimana kelompok militer fanatik yang akan menerima tongkat kepemimpinan. Dalam skenario terakhir ini Presiden Soeharto juga tidak ambil bagian karena berhalangan.

Jadi bagaimanapun, persoalan suksesi kepemimpinan nasional mendatang bagi negeri adalah ujian yang sulit. Karenanya haruslah menjadi kesepakatan, kemauan dan usaha politik kita bersama untuk menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Juga tak dipungkiri lagi soal suksesi akan semakin mendalam merasuk dalam dinamika politik bangsa ini. **(putri bawa lestari dari laporan Kris, Hening, Edy Darmoyo, yang dihimpun dari berba gai sumber)**

RIWAYAT "SUKSESI" DI INDONESIA

Proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang dilatarbelakangi terjadinya peristiwa G 30 S/PKI dan lahirnya Supersemar hingga saat inipun masih "buram", yang salah satunya disebabkan *raibnya* Supersemar sebagai bukti otentik terjadi kekuasaan tersebut. Isi Supersemar, yang antara lain memberikan wewenang kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mengamankan revolusi, "seolah-olah" mengukuhkan Soeharto sebagai pemegang status quo yang membuatnya lebih dari sekadar seorang jendral yang berada di tempat dan saat yang tepat telah menempatkan dirinya diatas semua jendral. *(Liddle, 1992:35)*

Orde Baru selama hampir 30 tahun dibawah Soeharto boleh dikata merupakan masa kepemimpinan yang panjang, yang selama itu pula proses pencalonan presiden, proses "perpanjangan" kekuasaan Soeharto dan juga usaha-usaha illegal untuk menggantikan kepemimpinan presiden merupakan hal yang unik di negeri ini. Karena meski negeri ini menganut paham demokrasi tapi dalam hal kepemimpinan, kita masih memegang teguh paham *pathemalistik* yang merupakan warisan dari raja-raja Jawa.

Hampir 49 tahun Indonesia merdeka tak pernah sekalipun MPR mencalonkan lebih dari satu calon presiden. Dan satu kali suksesi dalam suasana krisis yang mengawali berdirinya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dijadikan pengalaman yang cukup. Sementara dalam sejarah Orde Baru adanya sejumlah nama yang pernah "dicalonkan" atau "mencalonkan" sebagai presiden RI, seperti Sawito Kartowibowo, Judil Herry, Darius Marpaung Pangeran Diponegoro VI, Rudini, Ali Sadikin, Guruh Soekarnoputra dan Noorman, tentu saja tidak bisa dijadikan "pengalaman serius" untuk mempersiapkan suksesi yang damai dan demokratis.

Dan dalam mencalonkan diri sebaga kepala negara agaknya belum ada yang *seaneh* kasus Sawito Kartowibowo, yang berkaitan dengan

Sawito diadili dengan tuduhan subversif tahun 1976

perkara *klenik politik* dan *subversif* karena dalam kasus ini Sawito yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Hatta, Hamka, Mayjen (purn) Ishak Djuarsa, TB Simatupang dan Kardinal Justinus berusaha menggantikan kedudukan presiden Soeharto secara *illegal*. Kisah ini dimulai tahun 1972 setelah Sawito merasa mendapat *wangsit* di Gunung Muria dalam suatu *lelono broto* ditengah malam.

Lewat *wangsit* itu dia mengaku mendapat mandat sebagai ratu adil yang berhak atas tahta di Indonesia. "Perjuangan" Sawito dilanjutkan dengan menemui tokoh-tokoh nasional, dimana ia selalu membicarakan keprihatinannya terhadap kondisi sosial politik, kemerosotan moral, kedaulatan hukum yang dilecehkan penguasa, dan sebagainya. Selanjutnya Sawito membuat dokumen "Menuju Keselamatan, yang karena tidak berbau makar maka para tokoh itupun membubuhkan tanda tangannya, serta dokumen berjudul "Pernyataan, Mundur Untuk Maju Lebih Sempurna dan Pemberian Maaf bagi Almarhum Bung Karno".

Namun yang dianggap paling subversif adalah naskah "Surat Pelimpahan Kekuasaan" yang rencananya akan diserahkan pada Soeharto. Isinya antara lain menyebutkan Presiden menyerahkan kekuasaan kepada Bung Hatta, yang dibalik itu masih ada Surat Pelimpahan Kekuasaan II yang isinya berupa pelimpahan kekuasaan dari Hatta kepada Sawito.

Kasus Sawito yang terjadi antara tahun 1976 sampai menjelang SU MPR 1978 boleh jadi merupakan "batu ujian" bagi kelangsungan kepemimpinan Soeharto, apalagi dengan adanya gerakan mahasiswa 77-78 yang semakin menunjukkan keradikalannya. Dimotori Dewan Mahasiswa ITB, pertemuan Dewan Mahasiswa Se Indonesia pada 28 Oktober 1977 mengeluarkan statement keras yang mengecam pemerintah dan menolak dicalonkannya kembali Soeharto sebagai Presiden RI. Statement tersebut merupakan *antiklimaks* dari gerakan maha siswa 78 dengan dibekukannya Dewan Mahasiswa diseluruh kampus pada Februari 1979 dan pemberlakuan NKK/ BKK.

Aksi menuntut suksesi terjadi lagi dengan Kampanye Golput pada Pemilu 1992 di Yogya yang salah satu spanduknya berisi *"Golput atau pergantian penguasa, Okey?"*, yang berakhir dengan ditangkap dan diadilinya 2 mahasiswa dengan jerat pasal *harzat artikelen*. Dan tragis lagi dengan aksi FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia) di Gedung MPR/ DPR, yang meski tak menyinggung suksesi dan hanya menuntut pertanggungjawaban presiden dalam Sidang Istimewa MPR *toh* akhirnya aksi itu harus berurusan dengan "hukum keadilan". Kini 21 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jawa tersebut harus mendekam 6 bulan di penjara.

Karena meski negeri ini menganut paham demokrasi tapi dalam hal kepemim pinan, kita masih memegang teguh paham pathernalistik yang meru pakan warisan dari raja-raja Jawa.

Nah, barangkali dari kronologis singkat tentang "riwayat suksesi" di Indonesia tersebut kita bisa belajar dari sejarah bagaimana sebenarnya perjalanan kekuasaan dan suksesi di negeri yang berumur hampir setengah abad ini. **(krt/pbl)**

Amir Santoso :

KONSEP SATRIO PININGIT TEPAT

Berkaitan dengan proses suksesi mendatang, kita sudah sepakat dengan UUD 45 dan perangkat aturannya, yang menetapkan presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak. Jadi mekanisme itu saja yang dipakai sebagai pedoman, karena toh kita tidak mungkin melaksanakan pemilihan presiden langsung seperti di Amerika Serikat.

Sementara pelbagai perkembangan dinamika sosial politik saat ini juga menunjukkan hal yang menggembirakan, artinya bangsa ini semakin menyadari hak-hak poltiknya dan mulai menuntut pada pemerintah. Demontrasi buruh dan mahasiswa juga sesuatu yang negatif kecuali kalau kemudian gerakan itu menjadi *destruktif* dan menimbulkan kekacauan sosial. Dalam demokrasi ada batas antara *konflik* dan *konsesus*. Dan setiap tuntutan *segmen* sosial dalam masyarakat akan selalu membuka peluang demokratisasi

Menurut saya sistem suksesi sangat tergantung pada sistem sosial dan ideologi bangsa kita, karenanya saya berpendapat lebih baik pakai konsep satrio piningit, seperti Singapore. Ditunjuk kira-kira secara tidak langsung siapa yang akan menjadi presiden sehingga masyarakat mulai terkondisikan. Daripada kita mengadu dua tiga orang kemudian berantem?

Maswadi Rauf :

KEBERANIAN MPR SANGAT MENENTUKAN

Kita masih mempolemikkan konsep *single majority*, namun yang kurang disadari, khususnya oleh Golkar, *single majority* sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap pembaharuan politik. Karena *single majority* itu tidak hanya hak tapi juga kewajiban untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara formal kita telah menyepakati Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang kita anut, namun Demokrasi Pancasila sendiri masih memerlukan banyak penjelasan, dimana salah satunya bisa dikembangkan dengan diskusi-diskusi. Dan PJPT II cukup menambahkan pengertian yang lebih jelas terhadap Demokrasi Panca sila.

Keberanian fraksi-fraksi yang ada di MPR untuk mencalonkan presiden sesuai dengan keinginannya bisa dijadikan salah satu indikator demokratis tidaknya proses suksesi mendatang. Tapi bagaimanapun suksesi mendatang banyak tergantung pada anggota MPR, karenanya sejak awal MPR sudah mulai memikirkan dan mengevaluasi calon-calon yang ada. Kesiapan MPR dalam hal ini sangat menentukan.

Ariel Heryanto :

RUBAH AGENDA GERAKAN

Saya tidak berharap terlalu banyak akan terjadi perubahan besar-besaran dalam suksesi mendatang. Karenanya saya kemukakan tidak ada alasan untuk *bikin ribut-ribut* karena tidak akan ada banyak perubahan dalam proses suksesi kita. Seberapa besar dan seberapa struktural perubahan itu kalau kita lihat kekuatan sekarang masih terkonsentrasi ditingkat *elite*. Jadi susah mau membayangkan mereka bakal ribut.

Saya sarankan bahwa agenda kerja kaum intelektual bukan terletak pada lembaga kepresidenan (bukan karena tidak penting, tapi karena hal itu masih terlalu jauh dan tak strategis) namun pada *level-level mas politica*, kebebasan berpendapat, kebebasan parpol, partisipasi politik pada tingkat masyarakat desa, dan sebagainya.

Kita perlu ada kerja sama dengan alasan hal itu tidak terlalu *konfrontatif* namun tidak kalah *pondamentalnya*. Karena menurut saya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya ditempatkan pada satu orang saja, tapi bagaimana disebar meratakan pada tingkat parlemen, parpol, peradilan, intelektual, dan semua nya harus diberi kesempatan tidak hanya *disentralisir* pada lembaga kepresidenan.

PENTAS POLITIK 1998

Oleh : Amir Santosa

Dalam sistem politik apapun, entah demokratis atau tidak, pergantian kekuasaan adalah adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam suatu negara, Sebab penguasa, baik secara perorangan atau pun kelompok, pasti akan mengalami pergantian, baik secara alamiah maupun karena terjadi cara-cara laip untuk menggantikannya. Cara pergantian kekuasaan inilah yang kemudian membedakannya antara sistem politik yang otoriter dengan sistem yang demokratis.

Pergantian kekuasaan di dalam sistem politik demokratis di samping harus berjalan secara damai, konstitusional dan berkala. Sebab hal itu merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Malahan jika tidak pernah terjadi pergantian kekuasaan, publik akan bertanya apakah sistem politik tersebut demokratis atau tidak. *Seymor Martin Lipsett* menyatakan bahwa demokrasi adalah: "Suatu sistem politik yang memberikan kesempatan konstitusional secara berkala bagi pergantian pejabat pemerintah, dan suatu mekanisme sosial yang membolehkan sebagian besar anggota masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara memilih orang-orang tertentu untuk jabatan politik"

Demokrasi biasanya merupakan pemerintahan perwakilan di mana "penguasa" dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yaang kompetitif. Artinya di dalam proses itu terdapat lebih dari seorang calon. Para calon tersebut harus bersaing untuk memperlihatkan kepada para pemilih: siapa di antara mereka yang paling kompeten untuk menjadi pemimpin. Sebab itu adanya lebih dari satu calon menjadi satu hal yang penting dalam pemilihan penguasa (pemilu) yang demokratis, karena bila hanya ada seorang calon maka tidak akan terjadi kompetisi dan masyarakat tidak bisa memilih calon mana yang lebih baik.

Memang bisa terjadi, bahwa dalam proses pemilihan tersebut terpilih orang yang ternyata kurang memiliki kualitas intelektual yang cukup. Tapi dalam suatu proses pemilihan yang jujur dan adil, pemilih kadang lebih membutuhkan pemimpin yang yang memi liki moral dan etika yang baik, dari pada hanya sekedar pandai. Pemimpin yang terpilih haruslah memiliki sensivitas yang memadai terhadap kepentingan masyarakat, jika mereka ingin tetap terpilih kembali dalam pemilu berikutnya.

Pemilu yang diadakan secara berkala merupakan bagian penting lainnya dalam proses demokrasi, karena Pemilu merupakan sarana untuk menguji kembali penampilan pejabat pemerintah yang berkuasa. Rakyat dalam Pemilu itu diberi kesempatan untuk menguji baik atau tidaknya kualitas calon pemimpin mereka dengan cara memberikan dukungan atau menolaknya. Sebab itu, Pemilu selain harus berlangsung secara LUBER dan JURDIL, suatu Pemilu seharusnya menampilkan calon pemimpin yang telah dikenal dengan baik oleh rakyatnya. Sebab apabila dalam suatu Pemilu, rakyat tidak menggenal siapa yang akan dipilihnya, maka Pemilu yang demikian pada dasarnya bukan Pemilu yang demokratis.

Disamping sebagai sarana untuk menguji kepemimpinan. Pemilu juga merupakan suatu batas waktu bagi masa kepemimpinan. Artinya dalam Pemilu itulah masa jabatan seorang pemimpin negara akan berakhir. Seorang pemimpin negara yang sudah tidak lagi memperoleh dukungan rakyat dalam Pemilu, dia harus segera menyerahkan kekuasaannya pada pemimpin yang terpilih dalam Pemilu. Dengan demikian melalui Pemilu yang demokratis itulah terjadi proses pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional.

Meskipun demikian, konstitusi kadang merasa perlu untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan. Sebabnya adalah karena Pemilu ternyata masih memungkinkan munculnya individu atau kelompok yang

karena kelihaian manuver politiknya, mampu memanipulir dukungan rakyat dan dengan demikian ia atau kelompoknya itu akan terus menerus menjadi penguasa. Untuk mencegah kecenderungan seperti itu, konstitusi perlu mengadakan pembatasan masa jabatan kepala negara.

Pembatasan kekuasaan ini, dalam suatu negara demokrasi, dianggap perlu karena penganut paham ini percaya akan terjadinya korupsi kekuasaan jika seseorang atau kelompok yang berkuasa tanpa batas waktu. Mereka yakin bahwa sifat manusiawi yang serakah terhadap kekuasaan akan mendapatkan kesempatannya jika manusia atau penguasa itu diberi kesempatan atau keleluasaan untuk berkuasa dalam jangka waktu yang lama. Penganut paham ini tidak yakin akan adanya seorang pemimpin di jaman modern ini yang memiliki jiwa suci yang jauh dari untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Mungkin akan ada berbagai pihak yang berpendapat bahwa rangkaian teoritis yang dikemukakan tersebut merupakan pemikiran paham Liberal dalam demokrasi. Tapi demokrasi adalah sebuah konsep tentang sistem politik yang memiliki satu pemahaman universal yaitu bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Timbulnya berbagai penamaan atas konsep tersebut terjadi karena setiap bangsa ingin melakukan melakukan penafsiran sendiri terhadap konsep tersebut, dan penafsiran itu tidak pernah bisa terlepas dari kepentingan politik kelompok yang melakukan penafsiran terhadap konsep demokrasi tersebut, dan penafsiran tersebut tidak pernah bisa terlepas dari kepentingggan politik dari kelompok yang melakukan penafsiran. Demikianlah, penguasa Komunis menamakan sistem politik mereka sebagai demokrasi proletar, meskipun dalam sistem politik Komunis, rakyat samasekali tidak berkuasa. Dalam sistem demokrasi terpimpin di Indonesia era Soekarno dulu, juga terjadi penafsiran demokrasi menurut selera yang berkuasa.

Karena itu penafsiran yang universal seharusnya bertumpu pada penafsiran yang menonjolkan pada kekuasaan rakyat. Artinya bahwa penafsiran itu harus mampu menggambarkan suatu sistem politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan pengawasan sosial politik terhadap para pejabat pemerintah, apapun nama yang akan diberikan terhadap sistem politik itu. Dengan demikian, sistem politik tersebut harus mencerminkan adanya mekanisme yang mencukupi bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pejabat pemerintah, termasuk pula aktivitas untuk melakukan pergantian pejabat, jika memang hal terbut diperlukan. Tanpa adanya hak untuk melakukan kontrol ini, maka apapun nama suatu sistem politik, sudah dapat dipastikan bahwa sistem tersebut tidak akan mencerminkan makna demokrasi yang sesungguhnya.

Jika kita kaitkan hal pergantian kekuasaan dengan proses pemilihan presiden, memang kita belum pernah menggalami proses pemilihan presiden, dengan calon yang lebih dari satu orang atau selain dari calon yang sedang menjadi presiden. Bung Karno misalnya dia bersama Bung Hatta ditetapkan secara aklamasi oleh sidang yang juga mengesahkan UUD 45, untuk menjadi Presiden dan wakil presiden. Waktu itu tidak ada MPR dan tidak ada kampanye. Hal itu dapat dimengerti karena dalam situasi revolusi tentu tidak bisa dilaksanakan kampanye Pemilu, Peserta sidang pun tidak melihat ada calon lain yang lebih layak daripada pasangan Soekarno-Hatta.

Sejak awal Orde Baru hingga kini, kita juga selalu membuat pemilihan presiden dengan calon tunggal. Pemilihan presiden Soeharto secara berkesinambungan ini, meskipun konstitusional, telah terlanjur menimbulkan citra bahwa tidak ada orang lain yang pantas menjadi presiden. Partai partai politik sendiri tampaknya menjadi serba salah. Mencalonkan Soeharto lagi takut dianggap cari muka, mau mencalonkan tokoh lain sebagai presiden pengganti mereka juga takut. Jangan jangan mereka nanti malah akan digebuk Presiden. Jangan jangan mereka malah dapat mengganggu kestabilan politik, jangan jangan pemimpin baru tidak dapat menciptakan kesejahteraan hidup serta ketakutan ketakutan lain yang bersifat *imprimatur* lainnya, yang membuat mereka *impotensi* secara politis.

MENGAPA STATUS QUO ?

Hingga kini kita belum memiliki tradisi untuk memilih ketua Parpol sebagai calon Presiden, seperti yang pernah terjadi pada era 1950-1959 yang dianggap menganut sistem Liberal. Sejak masa demokrasi terpimpin hingga kini, kita cenderung diajak berfikir bahwa kepala pemerintahan itu tidak harus punya kaitan dengan Parpol, malahan mungkin lebih baik jangan parpol. Karena itu wajarlah jika kemudian PDI mencari tokoh di luar jajarannya untuk dicalonkan sebagai presiden. Jika kemudian PDI mencalonkan Rudini, hal itu mungkin disebabkan oleh latar belakang Rudini sebagai sebagai Jendral TNI AD, suatu kelompok Militer yang memegang hegemoni kekuasaan politik di Indonesia.

Tidak adanya tradisi untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala juga menyebabkan bahwa secara tidak sadar pikiran kita telah terpola untuk takut dalam menghadapi perubahan, karena perubahan (termasuk suksesi dalam hal ini) selalu dikhawatirkan akan terjadi secara *revolusioner* dan *inkonstitusional*. Padahal kita sendiri mengetahui adanya cara pergantian pemimpin yang damai dan konstitusional.

Pergantian pemimpin secra damai dan konstitusional ini menghendaki aturan main yang jelas. Setiap Parpol harus diperbolehkan secara terbuka dan bebas sesuai dengan aturannya, untuk menunjukkan calonnya masing-masing. Kemudian biarkanlah calon calon tersebut mempengaruhi MPR untuk memilih satu yang terbaik. Dengan demikian akan terdapat lebih dari seorang calon untuk dapat diseleksi MPR. Sebab yang namanya memilih, sekurang- kurangnya ada dua calon. Kalau hanya ada satu calon saja maka hal itu lebih disebut sebaggai penetapan.

Menurut dugaan, ketakutan terhadap perubahan juga dipengaruhi oleh kekawatiran akan terjadinya pergantian komposisi elite politik atau apa yang disebut oleh *Mosca, Pareto* dan *Michels*, sebagai *sirkulasi elite*. Sebab dalam perganmtian tersebut akan terjadi pula pergeseran berbagai kepentingan. Tidak banyak anggota elite politik yang rela kepentingannya terganggu sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan *Status Quonya.*

Yang sekarang masih menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang dewasa ini adalah "apakah presiden Soeharto akan mengundur kan diri setelah Pemilu 1997 nanti, atau ia masih akan meneruskan jabatannya?". Yang muncul kemudian adalah berbagai macam analisa, hipotesa, desas-desus sampai kepada jawaban skeptis (hanya Tuhan yang tahu?!).

Jabatan kepresidenan di masa Orde Baru ini telah menimbulkan masalah bagi dua pihak: yang mendukung staus quo dan yang bersikap kritis terhadap Soeharto. Pihak yang mendukung *status quo* mestinya adalah mereka yang memperkirakan akan terkena dampak buruk apabila terjadi suksesi. Dampak buruk tersebut bisa berarti kehilangan posisi penting, jabatan, fasilitas, kesempatan untuk dapat mengembangkan usaha dan kehilangan *patronage*. Pendukung ini bisa datang dari kalangan militer dan birokrasi sipil, pengusaha/ konglomerat atau kalanggan intelektual yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Pihak yang kritis menilai bahwa masa jabatan Soeharto sudah terlalu lama, selain mungkin ada perasaan bosan, mungkin timbul pula masalah keterkaitan dengan konstitusi dan pengembangan demokrasi. Apakah kekuasaan yang berlangsung lama itu relevan secara konstitusi dan pengembangan demokrasi di Indonesia.

Dua presiden RI yaitu Bung Karno dan Soeharto masing-masing telah memegang kekuasaan selama lebih dari 20 tahun. Keduanya menjadi presiden melalu situasi yaang darurat. Beberapa fungsionaris Golkar, misalnya AE Manihuruk, berpendapat bahwa kesulitan untuk mengganti Soeharto adalah bahwa karena mereka berdua (Soekarno dan Soeharto) merupakan tokoh sejarah yang memiliki previlege tertentu yang dapat melepaskannya dari ketentuan yang dibuat oleh sistem, bahkan sistem tersebut dibuat oleh tokoh itu sendiri.

Bahaya dari suatu kekuasaan yang berlangsung lama, menurut para pakar sejarah dan politik adalah munculnya *oligarkhi* serta *pqtronage* kekuasaan. Jaringan kekuasaan inilah yang selalu berusaha untuk mempertahankan *status quo*nya. Akibatnya, kesulitan untuk menciptakan mekanisme pergantian kekuasaan secara periodik, seringkali bukan karena presidennya sendiri tidak mau dan tidak ingin diganti, tapi lebih dari itu disebabkan oleh hambatan yang muncul dari jaringan kekuasaan itu sendiri. Apalagi jika tidak ada kekuatan lain yang mampu menandingi kekuatan jaringan kekuasaan tersebut.(*)

***) Pengamat Politik Universitas Indonesia**

DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Oleh : Maswadi Rauf

Untuk masa sekarang ini, yang ditandai oleh kehidupan yang semakin membaik seb·gai akibat dari keber-· ·silan pembangunan, masalah ·rpenting yang selalu men-·apat perhatian adalah demo-·ratisasi. Demokratisasi harus-·h diartikan sebagai usaha ·ntuk memperbaiki kualitas demokrasi Pancasila. Dengan demikian tuntutan demokra-·isasi tidak perlu menimbulkan tuduhan pihak penguasa ·olitik.

Banyak harapan yang diletakkan pada Orde Baru. ·embangunan politik demokratis dengan dasar Pancasila adalah salah satu dari harapan-harapan tersebut. Harapan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan ekonomi agar supaya rakyat Indonesia dapat dibebaskan dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkembang subur. Upaya pembangunan politik tersebut juga dapat dinamakan demokratisasi yakni proses panjang untuk menegakkan Demokrasi Pancasila.

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan antara Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Pancasila, namun terdapat persamaan-pesamaan yang sangat jelas antara keduanya. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Salah satu masalah besar dalam demokratisasi adalah penjabaran hubungan kekuasaan antara penguasa dan rakyat. Dalam praktek sehari-hari, lembaga eksekutif adalah pemegang pemegang kekuasaan pemerintah. Lembaga ini (yang juga dapat disebut "pemerintah") memerintah rakyat untuk kepen tingan rakyat dengan kekuasaan yang cukup besar, namun dalam prakteknya seringkali yang berperan besar adalah keinginan pihak eksekutif. Setelah itu, baru lembaga perwakilan rakyat menjalankan kontrolnya. Demokratisasi justru bertujuan agar kedaulatan rakyat dapat berfungsi dengan baik dalam pemerintahan. Sistem perwakilan menambah rumitnya masalah yang dihadapi demokratisasi karena suara para wakil rakyat belum tentu sama dengan suara rakyat yang diwakilinya.

Pemilihan Umum yang dapat memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya adalah prasyarat bagi terbentuknya sistem politik demokratis. Pemilu yang demokratis merupakan sarana rakyat untuk menyingkirkan wakil-wakil mereka yang tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Masa sekarang sering dijargonkan dengan PJPT II-menuntut adanya keberhasilan demokratisasi karena semakin besarnya tuntutan rakyat terhadap hal tersebut. Disamping itu juga akan menghadapi masalah-masalah baru yang tidak kalah rumitnmya dari pembangunan politik, seperti perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi cangih, dan peraingan yang semakin hebat dengan negara-negara lain. Dalam situasi seperti itu, demokratisasi seharusnya tidak lagi menjadi masalah. Salah satu hal yang jelas dalam demokrasi adalah bahwa proses tersebut tidak dapat berjalan dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan kesabaran dan usaha terus-menerus dari masyrakat dan penguasa politik. Sikap sabar di kalangan masyarakat amat diperlukan karna yang selalu menuntut demokrasi adalah mereka. Pihak pemerintah/penguasa bisanya menjadi sasaran tuntutan yang kadang-kadang bersikap defensif dan ragu-ragu memenuhi tuntutan tersebut.

Masalah kesabaran ini bisa menjadi *isyu* yang memecah belah warga masyarakat yang menuntut demokratisasi. Perkembangan seperti ini juga tidak sehat bagi kemajuan proses demokratisasi.

Ciri kedua dari proses demokratisasi adalah bahwa proses tersebut tidak dapat berjalan sekaligus dalam semua aspek kehidupan politik. Artinya adalah bahwa demokratisasi harus berjalan secara bertahap. Tahap demi tahap harus diselesaikan secara terencana sehingga demokratiasi baru tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Terdapat banyak perbedaan diantara para ahli mengenai ciri demokrasi. *Robert Dahl* memberikan penekanan pada lima unsur. Kelimanya adalah persamaan hak pilih, partisipasi efektif, kebebasan rakyat untuk memberkan kebenaran, hak pengawasan ditangan rakyat dan kegiatan politik yang mencakup semua warga masyarakat. Apabila kelima unsur tersebut telah terpenuhi, dalam arti telah terwujud dalam kenyataan, maka demokrasi telah terwujud dan demokratisasi telah menampakkan hasilnya

ARTIKEL UTAMA

Untuk kasus Indonesia, paling tidak ada enam hal yang perlu dicapai oleh proses demokratisasi. Keenamnya adalah kebebasan untuk berbicara (yang bertanggung jawab), kesediaan menerima perbedaan pendapat sebagai kewajaran, penyelesaian perbedaan pendapat secara persuasif, pemilu yang demokratis, peranan MPR/DPR sebagai alat kontrol sesuai dengan ketentuan kostitusion al dan keterbukaan pemerintah.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip dasar dalam demokrasi. Namun kebebasan tersebut adalah kebebasan yangbertanggung jawab. Apabila kebebasan berbicara telah disepakati, maka yang harus dikembangkan kemudian adalah kesediaan menerima perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang wajar . Pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan penguasa, umpanya, tidaklah perlu dianggap sebagai musuh pemerintah yang akan melakukan pemberontakan ataupun perebutan kekuasaan.

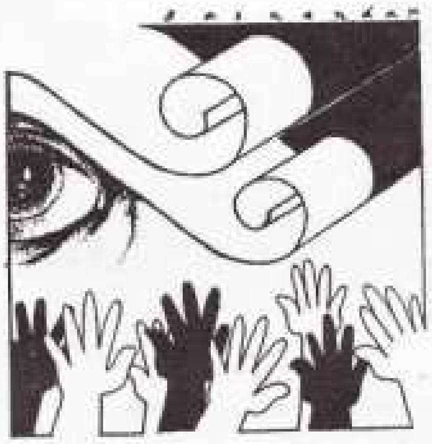

Usaha menciptakan persepsi diatas bukanlah pekerjaan mudah. Bangsa Indonesia adalah sangat sensitif terhadap kritik, sehingga kurang bisa menerima kritik dengan lapang dada. Kritik terhadap kebujaksanaan yang di buat oleh pemerintah cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang menentang pemerintah dan merongrong kewibawaannya dengan tujuan akhir menjatuhkan pemerintah.

Demokratisasi diharapkan dapat mengikis sikap seperti ini secara berangsur-angsur dan bertahap. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat akan melahirkan kecenderungan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara persuasif. Kecenderungan untuk menggunakan tindakan koersif dan represif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat terdapat dikalangan mereka yang tidak dapat mentolerir perbedaan pendapat.

Demokrasi beranggapan bahwa manusia bisa diajak untuk berargumentasi sehingga tujuan masing-masing bisa dicapai melalui perundingan-perundingan, bukan melalui pemaksaan dan penggunaan kekerasan.

Pemilu yang demokratis sudah jelas merupakan sarana penting untuk menegakkan demokrasi. Proses demokratisasi seharusnya menghasilkan pemilu-pemilu yang semakin demokratis. Sasarannya adalah supaya para pemilih dapat bebas menentukan organisasi politik sesuai dengan aspirasi mereka. Selama ini belum terpenuhi, sulit untuk menyebut pemilu di Indonesia sudah demokratis.

Pemilu yang demokratis akan menghasilkan lembaga perwakilan rakyat aspiratif. Dalam demokrasi, lembaga perwakilan adalah sarana pengawasan terhadap badan eksekutif. Tolok ukur yang digunakan dalam pengawasan oleh lembaga-lembaga perwakilan tersebut, dapatlah ditingkatkan kualitas *output* yang dihasilkan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah akan semakin tinggi kualitasnya karena telah dibuat semakin dekat dengan aspirasi rakyat dengan adanya saran dan kritik dari lembaga legislatif.

Masalah terakhir yang perlu dikembangkan melalui demokratisasi adalah keterbukaan pemerintah, keterbukaan disini berarti kesediaan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat, untuk kemudian menjadikannya sebagai bagian dari kebijaksanaan pemerintah. Masalah terpenting disini adalah menjanjikan aspirasi tersebut sebagai suatu keputusan,itu barulah separuh dari demokrasi. Kesediaan untuk mendengar berbagai suara rakyat haruslah diikuti oleh penyesuaian keputusan pemerintah dengan aspirasi rakyat tersebut.

Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk memenuhi semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Mau tidak mau pemerintah harus memilah-milah aspirasi-aspirasi tersebut berdasarkan urutan prioritas. Walaupun bagaimana dan apa pun yang diputuskan oleh pemerintah, selalu saja ada kemungkinan munculnya suara- suara kecewa terhadap keputusan yang dibuat pemerintah. Keberhasilan pemerintah justru ditentukan oleh kemampuannya untuk memilih aspirasi terbaik untuk dijadikan keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan protes dan gejolak dalam masyarakat.

***) Pengamat Politik Universitas Indonesia.**

KERATON SAYANG KERATON MALANG

Kota Solo sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa masih mempunyai kesan yang mendalam karena nilai-nilai budaya keratonnya masih cukup kental. Tinggalan materiil dan spiritualnya yang tak terhitung jumlahnya mengandung nilai budaya yang adi luhung.

Keraton Kasunanan dengan Menara Sangga Bhuwana. Diyakini sebagai tempat bertamunya Kanjeng Ratu Kidul

Meski tidak total namun hampir kesemuanya berpusat pada keraton dan sekitarnya, yang layak dipertahankan sebagai cagar budaya. Secara etimologis cagar budaya berarti suatu cadangan budaya untuk kemudian hari. Sehingga dapat diasumsikan sebagai pelestarian kebudayaan untuk dikembalikan pada anak cucu.

Gusti Mung, putri mbalelo Keraton Kasunanan Surakarta, juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi keraton saat ini. Soal Mambaul Ulum, hadirnya Beteng Plasa Solo, kericuhan intern kera bat keraton dan persoalan budaya lainnya cukup mengundang pelbagai kalangan untuk urun rembug.

KENTRUNG

Keratonku malang. Demikian komentar beberapa tokoh keraton Surakarta saat ini. Ada beberapa kemalangan yang menimpa, entah itu sengaja atau tidak, yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkaitan dengan keraton. Keraton diyakini oleh banyak orang sebagai akibat budaya, atau lebih tepat sebagai salah satu sumber pengkajian Jawa. Karena didalamnya tersimpan berbagai pengetahuan tentang falsafah hidup, etika, politik, kesenian, foklore, mistik, religius, arsitektur dan beragam hal lainnya. Sehingga pantas kiranya untuk dipertahankan eksistensinya.

Menurut *Bambang Murtiyoso* secara historis memang pada masa perjuangan kemerdekaan sikap pihak keraton Surakarta tidak jelas,

"Karena setelah kemerdekaan diproklamasikan pun kraton Surakarta tidak bersikap seperti Hamengkubuwono IX, yang menyatakan sebagai bagian dari RI. Akibatnya Solo tidak seperti Yogyakarta saat ini yang memetik buah," paparnya pada Kentingan.

Ditambah lagi dengan adanya kasak-kusuk bahwa banyak kekayaan keraton raib diluar bentengnya. Kemudian adanya kebakaran yang terjadi pada *Sasanaswaka* dan *Prabosuyoso* beberapa tahun yang lalu. Yang mana hal ini membawa pengageng baru dari Jakarta untuk ikut turun tangan. Tak berhenti sampai disitu, dalam kasus *Pura Mangkunegaran* yang berawal dari adanya hasil Mubes Himpunan Kerabat Mangkunegaran (HKMN) yang tak lagi mengakui KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario) Mangkunegoro IX, sebagai pemegang tahta Mangkunegaran, kekisruhan yang melanda keraton Solo pun bertambah.

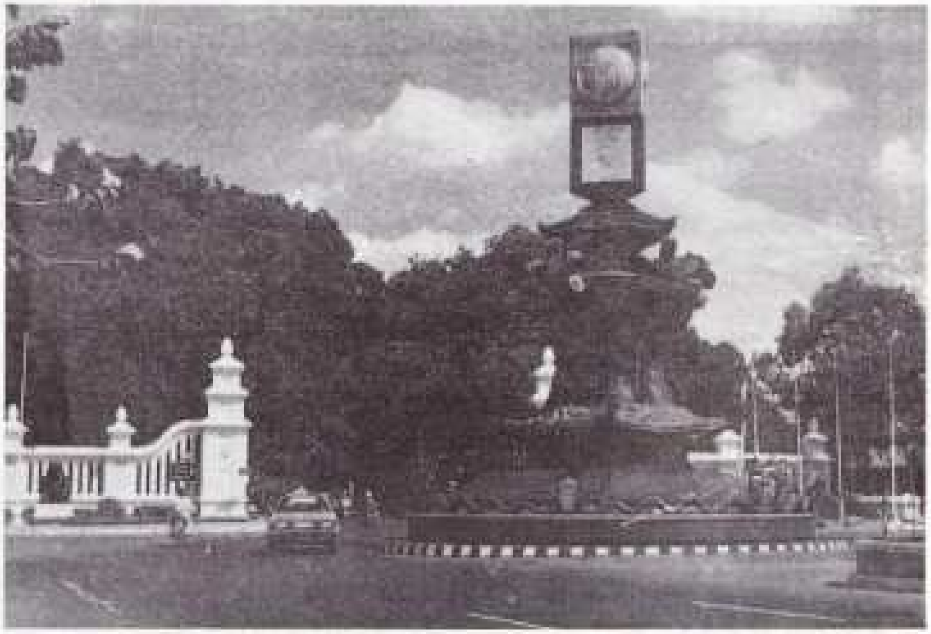

Tugu Adipura Kencana di Gladak. Silau oleh "kacang" BERSERI menenggelamkan "lenjeran" budaya, banyak dikritik tidak mencerminkan budaya Jawa

Demikianlah kemalangan keraton di Solo yang bertubi-tubi. Belum lagi budaya-budaya ritual keraton yang saat ini mengalami kemerosotan. Berdiri bangunan-banguan megah dan tugu besar ternyata lebih menarik rakyat, karena keraton telah tertutup dengan semua itu. *Nafsu kapitalisme* dari segelintir penguasa dan pengusaha yang tak lagi mengindahkan budaya lokal, sungguh sangat memprihatinkan. Hingga muncullah berbagai aksi yang mempersoal kannya, seperti aksi keprihatinan budaya, aksi mamba'ul Ulum dan lain sebagainya.

Mamba 'ul Ulum yang merupakan akses budaya dan sekaligus menyimpan nilai historis yang tinggi, juga tak luput dari nafsu metropolitanisasi. Gedung yang pernah dipakai sebagai pusat pendidikan intelektual muslim kota Solo dari masa kerajaan tersebut akan digusur juga. Dari sudut konseptual tata ruang kota, maka suatu bangunan dipindah akan menarik, namun hal tersebut akan merusakkan esensi budaya dan historis yang ada, demikian ungkap Ir. Rudy Subanindro.

"Karena pemikiran kita tentang pembangunan sebagai suatu *libirda* pembangunan ekonomi, sehingga dimensi *libido* berarti nafsu akhirnya derajat ma'rifat pembangunan kita dikalahkan," sambung kerabat keraton Kasunanan tersebut.

Penyebab kemalangan yang bertubi-tubi (selain mungkin di karenakan nasib) juga lantaran ketidakberdayaan sumber daya manusianya menghadapi gerak-gerik zaman.

"Sikap ketertutupan para pengelola keraton, sering tidak mampu membuat antisipasi perubahan yang ada

dalam negara yang serta manca-mancanya," ungkap Dra. GRAj. Koes Moertijah, putri ke 25 Susuhunan Paku Buwono XII yang pernah meraih predikat *Man of The Year* 1992 versi koran Suara Merdeka.

Sementara itu Bambang Murtiyoso mengatakan bahwa sikap tidak terbuka semacam ini sebenarnya juga masih terasa pada lingkungan kita yang berada diluar keraton, tetapi intensitasnya lebih terasa di lingkungan dalam benteng keraton, maka kemalangan selalu muncul kembali. Di keraton Surakarta tidak banyak kita menjumpai kaum intelektual yang sanggup memikirkan nasib cagar budaya yang satu ini. Sikap tidak tanggap terhadap tanda-tanda zaman ini, secara sederhana dapat kita lihat pada tindakan harus melepas sandal sewaktu masuk halaman keraton.

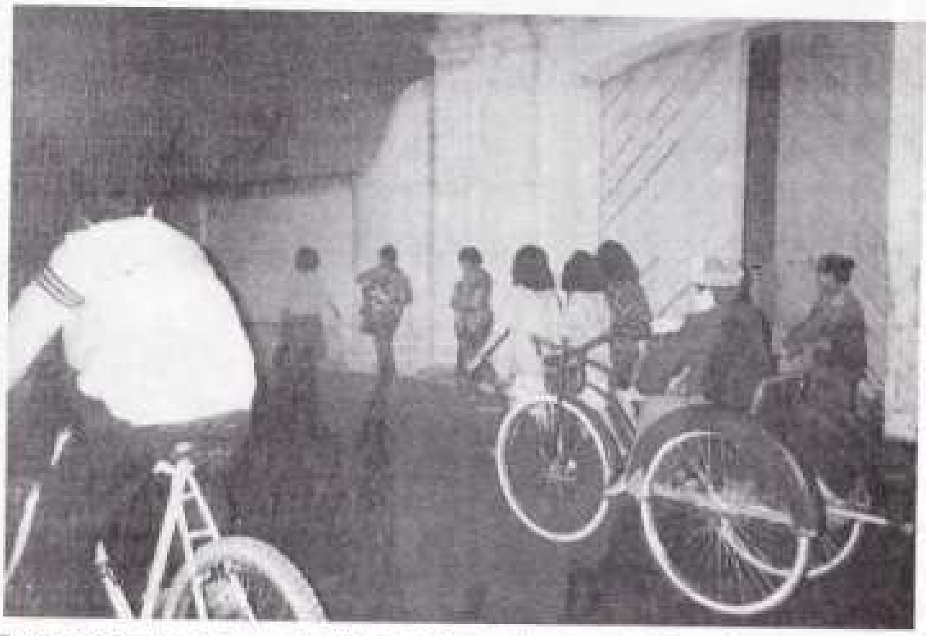

Tradisi masyarakat Jawa pada Malam 1 Sura, keliling tembok Pura Mangkunegaran.

"Selain itu, juga keraton lebih terbukanya terhadap para peneliti bule di banding dengan peneliti berkulit sawo matang seperti saya yang ingin masuk kedalam benteng. Bukankah ini sisa-sisa dari ketaatan keraton pada Belanda? Akibatnya, banyak mutiara pengetahuan hanya tersimpan dan terselubung mati. Ibarat *wastra lungset ing sampiran*, seperti barang yang tak bermakna karena hanya disimpan" katanya setengah mangkel.

Bagi Murtiyoso persoalan tersebut masih ditambah dengan sikap para pengelola keraton sering asyik sendiri, sehingga terlena dalam buaian mistik dengan mitos-mitosnya. Dijelaskan oleh dosen STSI yang kerap mendampingi penampilan dalang Ki Anom Suroto untuk memberikan kritik tersebut "Benda-benda milik keraton yang mestinya dapat disosialisasikan hanya disembah, dikafani, dan dikutuki kemenyan (dibakari dupa) seperti benda hidup, yang sebenarnya tidak pernah jelas berkah atau tuahnya. Para abdi dalem yang setia telah pasrah, seperti tanpa sadar, dengan mengucap : *nyandong tetesing embun (menunggu rejeki tiba) yang me netesnya itu seret.*

Padahal menurut Rudy Subanindro, "Kalau mau dan mampu, semua kekayaan keraton dapat dikelola sebagai aset wisata yang sangat tinggi nilainya, serta dapat digelar sebagai sumber kajian berbagai budaya Jawa".

Persoalannya berpulang kepada kurang tanggapnya sementara orang-orang keraton terhadap wawasan ini. Ketertutupan ini mungkin terlalu lamanya bergulat kenikmatan yang diwariskan oleh para leluhurnya. Sehingga mitos dewaraja dengan sabda pandhita ratu-nya telah berfungsi seperti awalnya, sebab gerak waktu dan lingkungan memilih tuntutan berbeda. Hal ini tidak disadari dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tanpa disadari pula bahwa warisan kenikmatan ini merupakan hasil para inovator kreatif di masa-masa sebelumnya.

Faktor utama yang menyelimuti keraton Surakarta ini hanya dapat dipecahkan apabila banyak lahir orang seperti Gusti Mung yang tidak takut terhadap kutuk Raja, demi kelestarian eksistensi keraton. Mestinya Gusti Mung sudah berusaha membuka wawasan kerabat-kerabatnya serta pengageng parentah keraton agar keraton tidak menjadi korban ketidakpuasan binatang ekonomi yang selalu menggoda. Dengan wawasan ke depan, produk budaya yang disimpan di keraton diharapkan menjadi milik dunia, bukan hanya dimonopoli *trah Mataram*. Trah Mataram memang berhak memilikinya, tetapi bukankah itu semua?

(Hening/ Budiyanto/ PBL)

Budaya Kita Sapi Perahan Pariwisata

Ir. RMH Rudy Subanindro

Dengan semakin ramainya pembicaraan tentang budaya di Surakarta, Kentingan menemui *Ir. RMH. Rudy Subanindro*, yang semasa muda juga aktif dalam pers mahasiswa. Kerabat Keraton Susuhunan lulusan Teknik Arsitektur UNDIP yang vokal dalam setiap pembicaraan tentang pembangunan di kota Solo, khususnya yang *menabrak* lingkungan keraton, ditemui Budiyanto dikediamannya yang merangkap kantor konsultan teknik dibilangan Jl. Patangpuluhan Jageran Solo. Berikut petikannya:

Budaya jawa cenderung dijadikan komoditi kepada pihak luar semen tara kondisi didalam lain, komentar Anda?

Ada tingkat-tingkat derajat dari budaya seperti juga dalam religius, ada tingkatan syari'ah dan ma'rifat. Sekarang syari'ah nya sudah tapi sedang ma'rifahnya belum. Atau masih dalam tingkat *eksibisionis*, pameran kelestarian. Tetapi belum menjadi *the way of life*. Itu gejala umum yang menyebabkan kita belum mampu menga daptasikan nilai-nilai kultural baru, dengan akar-akar budaya sebelumnya. Itu menimbulkan *anakronisme* budaya, dimana seseorang bisa *kebat kliwat* dalam menerapkan satu arus budaya *globalisasi*, arus budaya pembangunan. Arus itu telah mempanglimakan ekonomi, sehingga budaya yang timbul ini melulu mempunyai orientasi pada keuntungan ekonomi/ pariwisata saja.

KENTRUNG

Budaya yang belum jadi *the way of life* itu menjadi keprihatinan banyak orang, misal wayang orang atau ketoprak tidak mampu menarik perhatian khalayak.

Untuk melestarikan secara murni kontekstual juga global ada sekup-sekupnya. Keraton, sebagai *cultural center*, kalau mau konsekwen harus sampai pada melakukan pemberian caos. Sementara rutinitas-rutinitas sakral dari budaya spiritual butuh biaya. Nampaknya itu tidak menjadi hasil langsung. Sebetulnya sudah mulai mengambang lagi karena dirasa ada kementokan kultural. Ada kebosanan dan ketidakpercayaan pada kejanggihan jaman canggih.

Kementokan budaya itu pada kelompok mana?

Tidak bisa dikatakan kelompok-kelompok, tetapi lingkup-lingkup kejiwaan tertentu, kejiwaan sosial religius tertentu. Dalam arti kata mereka merasa bahwa kemodernisasian hidup ini mentok, tidak ada keseimbangan kepuasan religiusitas, batiniah dan ketasawufannya.

Adanya asumsi bahwa kemodernan telah melahirkan kementokan budaya, akankah optimisme penting bagi pertumbuhan akar budaya?

Saya setuju. Optimisme itu ditandai adanya keinginan untuk menekuni kembali akar-akar budaya. Ada semacam era, etos atau kredo baru bahwa kebudayaan kita akan terasa kembali. Ini bisa dilihat dari kejadian 1 Suro, kejadian-kejadian prosesi budaya keraton, kabupaten. Mereka mempunyai antusiasme baru. Antusiasme itu bagi saya bertanda sebuah optimisme. Bila dilihat dalam bentuk modifikasi baru atau asli terpadu, kemudian mau berpaling kembali.

Apakah respon Dirjen Kebudayaan terhadap kesadaran alami itu?

Nampaknya kapasitas eksekutif dalam bidang budaya, apa kapasitas anggarannya, apa kapasitas psikologis sejarah kelahirannya saya tidak begitu merasa terhadap karya-karya pemerintah. Budaya kita masih sebagai *sapi perahan*. Budaya itu seharusnya dilestarikan, diuri-uri dengan sendirinya dapat dimanfaatkan, tapi sering terbalik, pariwisata dan budaya sebagai materinya dijadikan sapi perahan. Pemerintah tampaknya belum begitu intensif *memback-up* problema-problema kebudayaan.

Kompromi antar berbagai kepentingan itu bagaimana?

Tarik tambang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi diperlukan *equilibrium sinergi resultansi* yang konstruktif secara *embrionic simbiosis*.

Bagaimana kekuatan bargaining keraton dengan pemerintah daerah dalam rencana umum tata ruang (RUTR), seperti kasus pembuatan Tugu Adipura di Gladak ?

Saya tidak terlibat langsung dalam formil prosesingnya. Tampaknya tidak ada komproni antara pemda dengan keraton. Mereka tidak berpegang pada peraturan yang ada, sehingga pemda boleh sak-sake, sak karepe dhewe padahal ada kepres yang mengatur kedudukan keraton.

Perlukah kesepakatan baru dalam pembagian hasil pariwisata?

Karena budaya koruptif dinegara kita sudah sedemikian kronis di segala segi, filsafat yang kemudian muncul dalam masyarakat sekarang, yang dihargai adalah uang. Atau karena sebagai krusial point, sehingga kita mengutamakan uang. Memang bisa menghasilkan. Namun secara keseluruhan ada dua arus. Ada secara sentralisasi dan desentralise. Ada bagian yang ditarik keatas dan didistribusikan secara nasional dan ada bagian yang basah yang didesentralisasikan, secara desentralising ada indeksnya. Keseimbangan antara aset dan distribusi, perlu dua arah.

Kiat yang diperlukan untuk menghindarkan gerakan pelestarian budaya yang musiman ?

Yang penting adalah *policy*, agar pelestarian budaya tidak *katarsis* dari modernisasi, tetapi juga tidak insidental. Ini sudah mulai, seperti ada pihak yang tidak malu-malu lagi berzia rah ketempat sakral. (hp/pbl)

Muka Sitihinggil Keraton Kasunanan, pengap dengan sesaknya dinamika Pasar Klewer

KEKUATAN DOMINAN DALAM KETERTINDASAN PEREMPUAN

Judul : Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia
Penyunting: Fauzie Ridjal Lusi Mangiani dan Agus Husein
Penerbit: PT. Tiara Klacara, Yogyakarta, 1993

Gender merupakan kontruksi sosio kultural atau interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Tapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis yang seperti selama ini terjadi dalam masyarakat. Sehingga gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Dari sinilah semua akan bersinggungan dengan gerakan gender. Karena dominasi yang diciptakan oleh maskulin, membentuk agama, kultur, ekonomi, politik dan semua kondisi berwatak maskulin, terlebih pada permasalahan agama yang dijadikan institusi sosial sangat menentukan, hal mana yang kemudian dijadikan legitimasi teologis. Kenyataan yang ada terjadi bias interpretasi yang sekian lama tidak bisa terselesaikan.

Nasikun dalam kumpulan tulisan buku ini memperlihatkan ekspansi kapitalisme global makin memperuncing marginalisasi perempuan. Munculnya kelas pekerja perempuan baru di negara berkembang merupakan problem yang terjadi juga di negara negara maju. peru bahan tersebut mencapai puncaknya tahun 70-an. Sekitar tahun 70- an negara maju mengalami krisis industri dan akibatnya mengalami kemandekan. Disinilah terjadi perubahan pola konsumsi, tranfer dan investasi kapital di negara-negara maju.

Pengalihan proses produksi ke negara-negara sedang berkembang dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah mempengaruhi tenaga kerja wanita di negara-negara berkembang. Sehingga perempuan di negara berkembang diekploitasi karena selain rendahnya cost juga mempunyai sifat sabar, teliti, rajin, patuh dan tidak pernah memberontak. Hasil tersebut ternyata di ekspor dimana para perem puan di negara maju menikmati hasil kerja perempuan di negera berkembang yang disinilah terjadi strategi ganda dalam memperj uangkan gerakan perempuan.

Buku ini tidak memperlihatkan alternatif terhadap gerakan perempuan di negara-negara industri yang dikaitkan dengan ling kungan. Di negara-negara maju disebutkan dengan ecofeminisme dimana gerakan ini mulai menyadari bahwa di alam semesta ini selalu terjadi pengrusakan yang disebabkan laki-laki (pembabatan hutan, nuklir, teknologi tinggi yang berwatak maskulin). Perempuan mulai sadar untuk melakukan gerakan terhadap kelestarian lingkungan. Seperti yang terjadi dalam seminar internasional di Salatiga tentang *"Faith, Economy and Ecology"* dimana salah satu nya menyebutkan bahwa kerusakan terjadi adanya masyarakat indus tri dan munculnya mitos desakralisasi dan pengrusakan alam terbe sar oleh laki-laki.

Buku ini belum menjawab secara tuntas perma salahan ini atau kondisi lapangan yang sedang berkembang belum secara seluruhnya terlampir bahkan terkesan data-data yang ditampilkan terlalu teoritis sehingga permasalahan yang kongkrit dalam masyarakat belum bisa terjawab secara keseluruhan. **(Purwoko, Staf Litbang GIAT Surakarta).**

SERAMBI

Pak Koento bersama istri di Tanah Suci. Tak tahan dengan debu

N*das rektor ora ono regane*. Jangan salah tafsir, pernyataan tersebut bukan dari para mahasiswa UNS yang hobby mengkritik rektornya. Juga bukan dari pihak yang sedang berkompetisi menjelang suksesi rektor pertengahan tahun ini. Sekali lagi bukan. Tapi malah diucapkan Rektor UNS sendiri, **Prof. Dr. H. Koento Wibisono Siswomihardjo.**

Sebagaimana umat muslim lainnya, ibadah haji memang menjadi sesuatu yang istimewa bagi orang nomor satu di UNS dalam delapan tahun terakhir ini. Bahkan doktor filsafat lulusan Unicersitas Leiden Belanda ini, yang kelahiran Purworejo 14 Agustus 1930, keheranan sendiri dengan inisial "H" yang tiba-tiba melekat didepan nama panjangnya.

Dalam ibadah itulah, "kepala saya sempat *dicekeli* orang-orang besar, karena berdesakan dan saling berebut," paparnya sambil memperagakan pada Kentingan yang menemuinya diruang kerja Gedung Rektorat. Dengan penuh keharuan dan rasa syukur, rektor yang hobby renang dan menikmati musik *karawitan* klasik ini menceritakan musibah yang menelan banyak korban ketika jemaah haji saling berdesakan melakukan jumrah di Mina.

"Saya jadi sadar setelah Bu Koento menyebut *asma Nya*," akunya dengan mata sedikit berkaca-kaca.

Dalam 14 hari perjalanan ibadah haji atas undangan Menteri Agama RI tersebut, Eks. Tentara Pelajar yang berputri dua ini masih menyempatkan diri untuk mendo'akan bagi kemajuan UNS sepeninggalannya akhir tahun ini. Dan ternyata ia berangkat ke Tanah Suci dengan sejumlah *doa titipan* dari rekan-rekannya.

Wah, kalau tahu sejak dulu pasti kita semua nitip juga supaya dido'akan dapat rektor baru yang sesuai aspirasi mahasis wa. **(bening/ nurul)**

Mulyana W Kusuma

Tidak seperti media umum, majalah mahasiswa relatif lebih independen. Disamping memberitakan berita dalam kampus, diluar kampus hendaknya lebih diintensifkan pemberitaanya.

"Misalnya permasalahan rakyat kecil yang luput dari pemberitaan pers umum," papar **Mulyana W. Kusuma** pada Mahfudin dari *Kentingan* disela penyelenggaran sebuah seminar di Jogjakarta.

Menurut Sekjen Eksekutif YLBHI ini dalam soal suksesi kepemimpinan nasional kita harus lebih memperhatikan sistem suksesi itu sendiri. Sambung dosen kriminilogi UI ini "Kita jangan terlalu menyoalkan orang yang akan menjadi kandidat presiden. Terlebih buat mahasiswa yang sadar akan hak-haknya, jangan mudah *terkecoh* dengan figur."

Menyinggung suksesi rektor di UNS, Mulyana berpendapat hendaknya rektor nantinya bisa memanage dan mengarahkan civitas akademika untuk lebih mampu menciptakan kehidupan kampus yang lebih demokratis. **(mahfudin/pbl)**

SERAMBI

Ternyata bukan hanya putri Solo yang bertabiat malu, karena rasa malu bukan monopoli gadis dari negeri berkembang. Gadis Jepang ini juga pemalu berat.

Ditemui *Kentingan* di kostnya, gadis yang mengaku bernama **Risa Kanematsu** ini bakal marah sekali kalau namanya diganti Daihatsu atau Komatsu. Ia telah

Risa Kanematsu, cintai pemuda Joko tingkir

merampungkan skripsinya di Universitas Rikkyo, Jepang dengan judul *Ken Arok dalam Sejarah Jawa*, karena kebetulan ia mengambil jurusan Sejarah Jawa di Fakultas Sastra, Rikkyo. Tinggal di Solo hampir delapan bulan untuk mengadakan penelitian tentang sejarah Jawa, karenanya ia merasa perlu kursus bahasa Indonesia di Fakultas Sastra UNS.

Mau tahu komentarnya tentang mahasiswa UNS, " Mereka senang ramai kalau sudah kumpul".

Meski terbata ia bisa dengan lancar *ngobrol* tentang berbagai hal dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Soal LDP sampai *geisha*.

"*Geisha* itu bukan *Hostes*", katanya. Menurutnya dalam masyarakat Jepang *geisha* cukup terhormat kedudukannya. Karena mereka adalah wanita Jepang yang menekuni budaya tradisionalnya seperti *luwes* memakai *kimono*, tari tradisional, sampai tata cara minum teh dan *sake*.

Kanematsu mengaku suka tinggal di Solo. Kenapa? "Karena aku sedang *kasmaran* dengan orang Indonesia", katanya *imut-imut*. Entah siapa? Yang jelas ia senang laki-laki yang setipe *Ken Arok*, dan tidak suka lelaki setipe *Airlangga* ?!. (mahfudin/**)

Mantan Pangkopkamtib **Jendral (Purn) Soemitro** kembali jadi buah bibir setelah biografinya yang banyak membeberkan peristiwa Malari (Malapetaka 5 Januari 1974) menimbulkan *polemik*.

Pensiunan jendral bintang empat yang naik jadi Pangkopkamtib dalam usia 43 tahun ini dalam seminar Dinamika Militer dalam Perjalanan Republik kembali menarik perhatian. Menurut Soemitro peran militer dilihat dari ukuran waktu yang sudah lebih dari dua dasawarsa, maka dominasi militer dalam bidang politik tidak perlu dilestarikan. Katanya, "Dari segi watak dan kepribadian ABRI, sebenarnya pelestarian itu tidak mungkin terjadi. Karena kehadiran ABRI dalam bidang sosial politik sekarang ini adalah akibat dari perkembangan kehidupan politik bangsa yang *menyeleweng*".

Ditambahkan ketika dulu proses pencarian sistem politik yang berkepribadian Indonesia pada akhirnya tanpa disadari menciptakan situasi krisis, maka militer segera turun tangan setelah terjadi *"kebakaran"* tidak ada yang memadamkan.

Jadi logikanya, bila keadaan krisis atau darurat telah usai maka tidak ada alasan bagi ABRI untuk tetap hadir menduduki posisi kekuasaan.

"Serahkan saja pada tenaga profesional dari bidang yang bersangkutan," papar Soemitro yang dulu setelah meredanya Malari kemudian mengundurkan diri sebagai Pangkopkamtib, meski wakilnya **Soedomo** lebih dulu minta mundur tapi ditolaknya. Kapan ada lagi seorang ksatria yang berani mundur dari jabatan yang memiliki kekuasaan begitu besar seperti Soemitro (budiyanto/pbl)

SENTILAN

KENTHONG

* Menurut Amirul Haj Indonesia Harmoko membanjirnya jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun pertanda meningkatnya ketaqwaan dan kesejahteraan.

  Di masyarakat kita biasanya kalau pejabat naik haji, joke yang berkembang adalah pejabat itu mau nyari berkah atau mau nebus dosa-dosanya.

* Rektor UNS menolak mengakui dan tidak akan melantik BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UNS hasil bentukan Musyawarah Anggota SM UNS akhir Mei lalu.

  Demo, mimbar bebas, protes keras, mogok, %$@#$#&@)((&#@!*???*

* Menurut Presiden Soeharto banyak kalangan dalam masyarakat yang tidak memahami UUD 45 secara mendalam.

  Juga sering orang yang (merasa) paling memahami memberikan penafsirannya untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

* Sejak 22 Juni lalu kita kehilangan tiga penerbitan pers karena SIUPP-nya dicabut.

  Sayangnya tidak ada SIUPP (surat ijin untuk perpanjangan pejabat) milik pejabat kita yang diduga bermasalah yang dicabut.

BIDIK

*Andai
bangunan-bangunan tua
ini sanggup bercerita pada
kita tentang para nenek
moyang dan
perjuangannya
Yang telah menciptakan
karya-karya besar yang
seharusnya kita lestarikan*

BIDIK

BIDIK

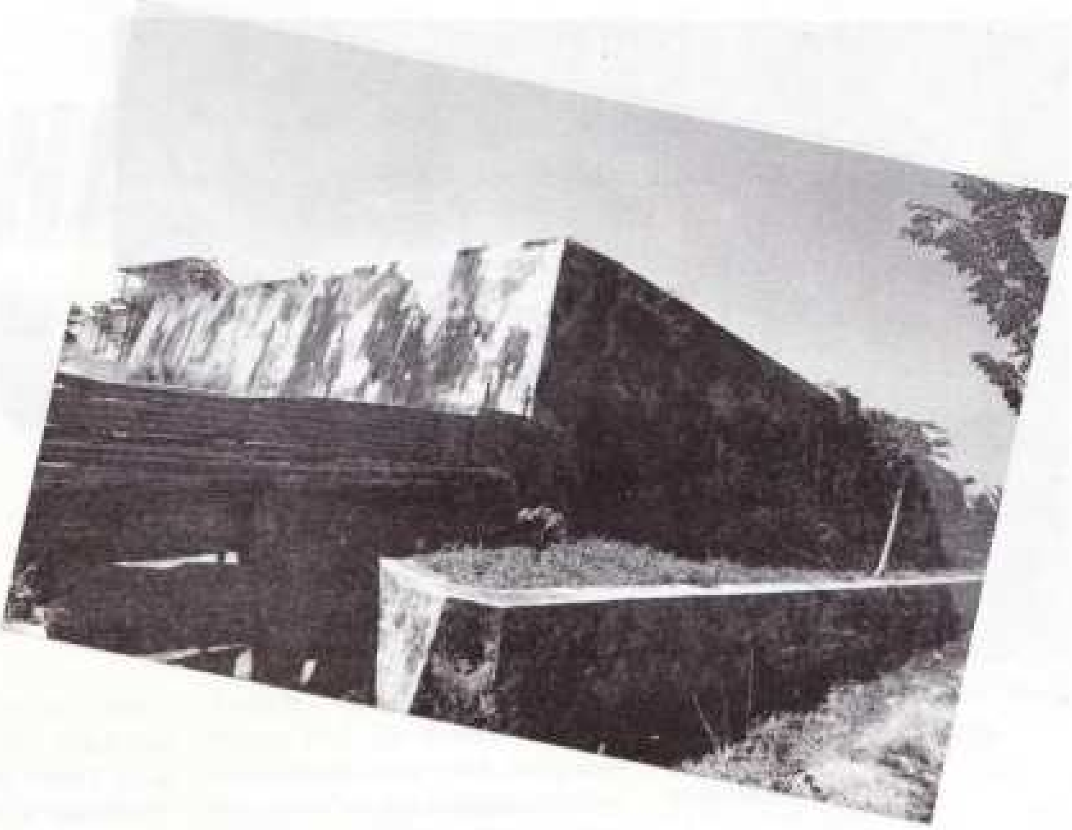

Lalu jika mereka tergusur
atas nama modernisasi
oleh investor-investor
serakah
Apalagi yang dapat kita
kembalikan pada anak
cucu kita.
Di jaman ini di mana
manusia terus memburu
nilai-nilai fana maka
mereka lupa pada akar
sejarah, pada tradisi

BIDIK

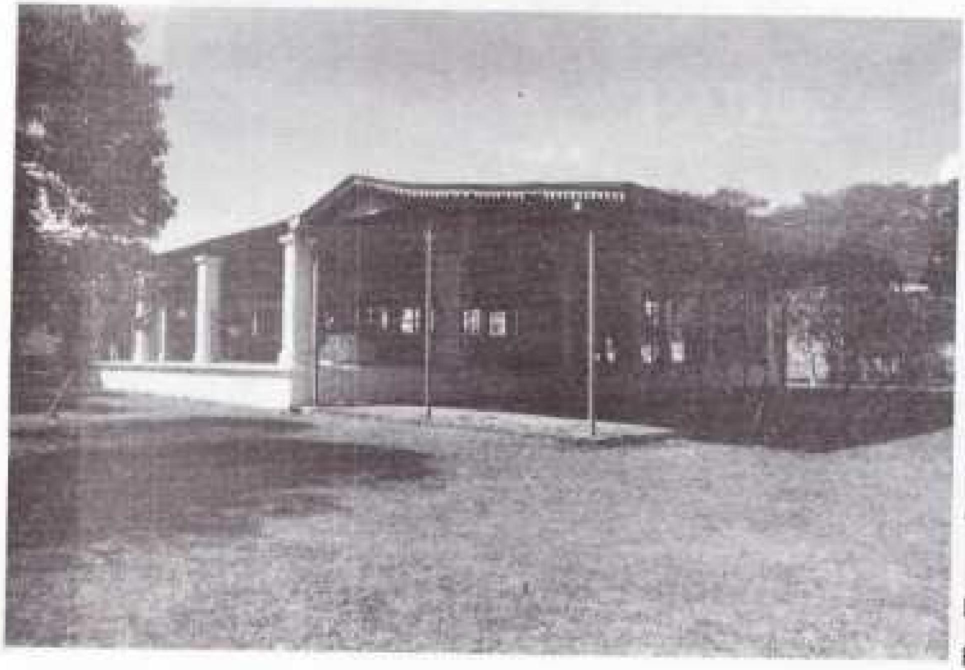

Tak pelak lagi,
bangunan-bangunan ini
terancam
masihkah kita bisa peduli
tersentuhkah hati ini untuk
tidak sekadar
melestarikan, tapi juga
membangun maknanya

Narasi : Kris / Bng
Foto : Budi / Basnendar

WAJAH LURAH UNS

Dalam pergeseran ke arah modernisasi, dunia perguruan tinggi sebagai pabrik ilmiah yang memfokus pada ilmu pengetahuan, dengan tenaga-tenaga sarjana yang dihasilkannya merupakan unsur penting keberhasilan pembangunan. Masyarakat dan pemerintah daerah Sura karta mulai sedikit tergugah oleh suatu kenyataan kondisi obyektif. Bahwa kegairahan menjaga kontinuitas dan pengembangan pembangunan, haruslah berpijak pada pokok yang kuat yaitu akar intelektual.

Selain mencuatnya isu suksesi di tingkat nasional, parpol hingga pada kepala pemerintahan terendah yaitu lurah, tidak kalah menariknya isu suksesi yang merebak di kalangan akademis, khususnya di Universitas Sebelas Maret (UNS). Setelah proses suksesi di kalangan lembaga kemahasiswaan kini giliran suksesi rektor yang akan menjadi sorotan segenap civitas akademika.

Suksesi rektor UNS terlihat ramai dibicarakan, baik di kalangan mahasiswa, dosen maupun pers. Terutama tentang siapa pengganti Rektor Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomiharjo yang telah mengabdikan diri dalam dua kali masa jabatan. Meskipun pemilihan akan dilaksanakan oleh Senat Universitas, Agustus mendatang tetapi calon kandidat dan syarat calon sudah bermuncu lan dengan berbagai versi dan misi yang bervariasi.

UNS memang masih tergolong muda dibanding universitas negeri lainnya. Namun demikian UNS telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, karenanya suksesi rektor kali ini akan sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Karena rektor merupakan penguasa kampus tertinggi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, serta tenaga administrasi di lingkungan kampusnya. Disamping itu juga mewakili kampus dalam hubungannya dengan lingkungan dan pihak-pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi diperlukan syarat- syarat khusus untuk menduduki kursi rektor.

Kriteria Sang Rektor

Syarat yang diperlukan adalah *pertama*, wawasan ilmiahnya harus luas, yang merupakan syarat mutlak, dibuktikan dengan prestasi akademik seperti penelitian atau gagasan ilmiah. *Kedua*, mempunyai kapabilitas dan kualitas kepemimpinan yang menonjol, mampu mendayagunakan sumber daya utama yang ada semaksimal mungkin.

Hal tersebut dikemukakan Drs. Totok Sarsito SU, MA, staf pengajar FISIP ketika ditemui Kentingan. Sementara Pak Koento (panggilan akrabnya selama ini) sendiri hanya mengisyaratkan bahwa calon rektor harus berumur tidak lebih dari 56 tahun.

Pada kesempatan lain, Drs. Sudharmono SU mengemukakan bahwa calon rektor tidak hanya orang dalam tapi juga diprioritaskan lulusan UNS sendiri. Karena menurutnya, UNS sudah saatnya dipimpin

oleh alumnusnya sendiri. Dia menegaskan, "Dalam pemilihan rektor hendaknya calon dari dalam UNS, karena dia yang lebih tahu kondisi akademisi dan koreksi yang harus dilakukan. Namun dalam lingkup universitas memang tidaklah sesederhana itu, karena universitas merupakan suatu kesatuan dari berbagai disiplin ilmu".

Menurut staf pengajar Sejarah Fakultas Sastra tersebut seandainya rektor berasal dari luar, hendaknya mampu membenahi kekurangan-kekurangan yang ada, bukan hanya melanjutkan kebijaksanaan pendahulunya tanpa suatu pembenahan. Rektor itu hendaknya memiliki gagasan baru yang mengarah pada akademis dan berpandangan jauh ke depan.

"Masalah profesor-doktor tidak penting. Yang terpenting adalah memiliki komitmen akademis yang bagus. Yang lebih *njlimet*, saya pikir adalah bagaimana dia harus mengimbangi kepentingan yang kadang saling bertentangan, sesuai dengan kata *universal* dari universitas itu sendiri," paparnya panjang lebar pada *Kentingan*.

Sementara itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Solo juga turut *urun rembug* seputar suksesi rektor UNS tersebut, dimana yang jadi perhatian adalah menyangkut syarat-syarat untuk menduduki jabatan rektor. Yakni, loyalitas, usia, dan yang paling menonjol adalah harus berasal dari orang dalam. Artinya GMNI tidak setuju jika rektor UNS berasal dari luar atau rektor hasil *drop - dropan*

Namun demikian ada suatu keinginan mendasar dari berbagai kalangan bahwa calon rektor haruslah aspiratif. Ini merupakan faktor penting selain kriteria wawasan ilmiah yang luas.

Hersy Yamanto, seorang aktivis mahasiswa, memberikan pandangannya mengenai kriteria aspiratif, bahwa ada dua pendekatan yang dilakukan. Pertama, pendekatan sistem, yaitu mencoba membentuk iklim demokratis dalam setiap pengambilan keputusan rektor.

"Contohnya sampai saat ini tidak ada wakil mahasiswa yang duduk di Senat Universitas. Selama ini Senat Universitas didominasi profesor dan dekan sehingga harus dicermati apakah keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Kedua adalah pendekatan kultur, yaitu menciptakan kultur yang demokratis dengan adanya dialogis." tutur mahasiswa teknik yang menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta.

"Memang kriteria aspiratif merupakan prioritas utama" timpal Soerowo SH. Menurut Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNS ini menetapkan kriteria aspiratif sebagai kriteria utama beruntun sampai pada kriteria mantan aktivis sebagai hal yang terakhir. Dikatakannya, pemimpin yang baik mestinya melewati tahapan- tahapan tertentu.

"Tidak bisa *dadakan*. Pemimpin dadakan cuma lahir lewat revolusi. Dan UNS yang telah berusia 18 tahun kiranya cukup mampu *menggodok* seorang pemimpin universitas," jelasnya.

Lebih menarik lagi adalah keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan rektor seperti yang diungkapkan Hersy Yamanto di atas, meski secara yuridis tidak ada aturan yang mewajibkan mahasiswa diikut sertakan dalam pemilihan rektor. Namun menanggapi hal itu Totok Sarsito berujar, "Itu tidak bisa. Mahasiswa dilibatkan di mana? Tidak ada aturannya."

Sedang menurut Soerowo, mahasiswa dilibatkan dalam pemilihan rektor itu justru tidak apa-apa. Namun tambahnya, "Mahasiswa dalam hal ini adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Mereka sah-sah saja untuk mengajukan calon rektor, dengan catatan usulan itu bukanlah *harga mati*." Karena hak memilih ada pada Senat Universitas, yang akan diusulkan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya rektor itu diangkat atau diberhenti kan oleh Presiden.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hersy bahwa, "Yang kita harapkan adalah mencoba memasukan konsep-konsep atau sistem yang dapat menyalurkan aspirasi mahasiswa." Mengenai peranan Senat Mahasiswa Universitas dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa selama ini tidak sampai ke atas atau *dipapas* ditengah jalan, dia berpendapat bahwa hal tersebut karena *bargaining power* yang kurang dari SMU sehingga tidak mampu menyampaikan aspirasi maha siswa.

Posisi rektor saat ini berada pada posisi dilematis, apakah dia sebagai cendekiawan atau sebagai seorang birokrat. Sebagai cendekiawan ia bagian dari masyarakat ilmiah yang bebas. Sementa ra sebagai seorang birokrat ia bagian dari kekuasaan yang terikat pada banyak aturan-aturan. (**)

Laporan : Ali Rustamaji, Robiatul A., Ulin Ni'am Y., Makarti Rahayu dan Topik Gunawan

REKTOR HARAPAN KAMI

Sehubungan berbagai masalah seputar suksesi rektor UNS Kentingan telah menyebar angket sebanyak 250 buah. Responden adalah para mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di lingkun gan UNS. Angket hasil kelompok kerja (pokja) yang dibantu rekan-rekan Lembaga Penerbitan Fakultas dibagikan pada tiap fakultas, masing-masing berjumlah 25 lembar kecuali FKIP dan Fakultas Kedokteran lebih banyak karena perbandingan jumlah mahasiswanya yang memang lebih banyak. Dari angket yang tersebar itu sebanyak 184 lembar yang berhasil kembali dan terisi.

Responden yang *notabene* masyarakat kampus rata-rata berusia 18-25 tahun, diantara mereka ada yang aktif berorganisasi/aktivis mahasiswa, tetapi juga ada yang pasif pada kegiatan-kegiatan. Jelasnya polling disebar secara acak.

Dari jawaban-jawaban yang masuk, diperoleh hasil bahwa pemilihan rektor itu haruslah dilaksanakan demokratif dan aspiratif. Bisa dilihat dari mereka yang setuju dengan pemilihan rektor secara demokratif aspiratif sebanyak 98,30 % , sementara yang tidak setuju hanya 1,7 % saja.

Ironisnya mahasiswa lebih mendambakan calon rektor dari luar, meski tidak begitu jauh selisihnya. Mereka yang setuju calon rektor dari luar ada 50,57 %, sedang yang mendukung calon dari dalam 49,43 %. Menyambung calon dalam atau luar, nampaknya nama PRI UNS Prof. Haris Mudjiman menduduki nominasi pertama (23 %), disusul Ketua ICMI Orsat Solo Prof. Soenarwan (22 %), Satjipto Rahardjo dan Edi Subroto (4,5 %). Nama-nama lain yang dipilih satu dua responden seperti Ir. Boma, Kusnadi Hardjosumantri, dr. Sucipto, Amien Rais, Andrik Purwasito, Muhajir Darwin, HB. Sutopo dan lain-lain.

Kepemimpinan Rektor Koento sendiri dinilai 15,3 % responden bagus, sedang 65,9 % menilai cukup lumayan, karena mampu mengang kat sedikit nama UNS. Sisanya menilai kurang dengan berbagai alasan seperti kurang terbuka, kurang demokratis dan aspiratif, tidak pernah turba (turun ke bawah), terlalu otokrat dan sebagainya.

Dari prioritas syarat rektor, kriteria sanggup membawa perubahan kehidupan ilmiah dan kemahasiswaan menempati peringkat tertinggi 36, 3 %. Selanjutnya, semakin menurun adalah kriteria akomodatif, demokratis, mengerti kepentingan berbagai pihak (24,8 %), cendekiawan dan pengelola kampus yang baik (23,3 %), dan visi kepemimpinan menonjol 15,6 % .

Hal yang juga menarik mengenai usul dilibatkannya mahasiswa secara langsung dalam proses pemilihan

Pemilihan harus demokratis dan aspiratif

setuju	98,30 %
tidak setuju	1,7 %

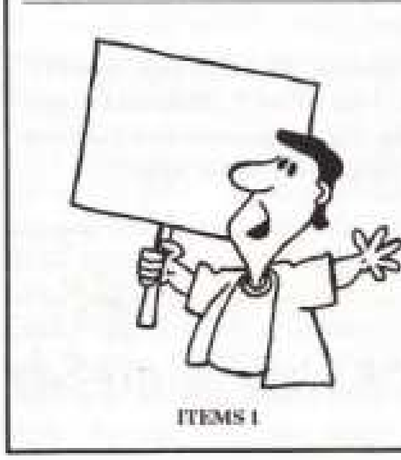

ITEMS 1

Calon Rektor dari "Dalam"

YA, HARUS	49,43 %
TIDAK HARUS	50,57 %

ITEMS 2

FOKUS KHUSUS

rektor. Dari hasil angket sebanyak 66,48 % menghendaki mahasiswa dilibatkan dalam pemilihan tersebut, sedang 31,25 % menyatakan tidak setuju, lainnya abstein (2,27 %).

Mengenai pandangan sudah cukup banyakkah calon rektor UNS dari dalam, 18,75 % menyatakan rektor yang merangkap anggota legislatif juga tidak banyak dikehendaki responden dengan suara tidak setuju 69,32 %, 9,66 % menyatakan setuju, 18,18 % boleh-boleh saja dalam artian tidak apa-apa rektor merangkap legislatif, hanya 2,84 % yang tidak berpendapat.

namun ini tidak bisa disebut mahasiswa yang apatis, apalagi yang tidak berpendapat ada 3,41 %.

Yang jelas dengan semakin dekat berakhirnya masa jabatan Prof. Koento Wibisono maka semakin marak pula tentang isu-isu yang muncul tentang suksesi rektor ini.

KRITERIA REKTOR

Visi Kepemimpinan menonjol	15,6 %
Akomodatif, Demokratif, mengerti kepentingan berbagai pihak	24,8 %
Cendekiawan dan pengelola kampus yang baik	23,3 %
Sanggup membawa perubahan kehidupan ilmiah dan kemahasiswaan	36, 3 %

ITEM 3

cukup banyak, sedang yang berpandangan calon dari dalam sedikit 63.07 %, sisanya yang menyatakan tidak ada calon (13.07 %) dan yang tidak berpendapat 5,11 %.

Namun ketiadaan orang dalam untuk menjadi calon rektor ada berbagai pandangan sebab musababnya. Karena kesempatan belum ada (25,56 %), kualitas guru besar UNS belum memadai (22,15 %), dan 27,8% menyatakan UNS sebagai perguruan tinggi negeri muda wajar belum punya orang dalam yang tangguh. Sedang responden yang tidak paham mengenai tiadanya orang dalam hal ini cukup besar yaitu 24,43 % dengan suara abstein.

Sedang perihal rektor dropping dari pusat, sebagian responden menyatakan tidak setuju dengan suara 59,66 % protes, walau demikian yang setuju juga cukup besar (27,,84 %), sedang sisanya abstein. Jabatan

Sebagian besar mahasiswa yang menjadi responden menyatakan pemilihan rektor adalah event yang menarik (90,34 %), sedang yang menyatakan tidak menarik 6,25 %

Mahasiswa harus dilibatkan dalam proses pemilihan

YA	66,48 %
TIDAK	31,25 %
ABSTAIN	2,27 %

ITEM 4

Bahkan menurut Pak Koento sendiri, saat-saat ini bisa dikatakan semua orang bebas untuk omong atau mengkritik siapapun. 'Sebab dijaman keterbukaan ini semua orang memilih kebebasan. Jadi jangan terkejut kalau ada orang ngomong neko-neko. Semua orang bebas ngomong. Apakah itu mahasiswa atau dosen, baik secara pribadi, kelompok atau atas nama organisasi,' tegas Koento.(**)

Laporan : Ali Rustamaji, Robiatul A., Ulin Ni'am Y., Makarti Rahayu dan Topik Gunawan dari hasil riset : Hery, Erlin, Ridlo, Agus P.

WATAK KERAKYATAN GERAKAN MAHASISWA 1990-AN

Perjalanan sejarah politik Orde Baru sedikit banyak diwarnai oleh peran politik mahasiswa. Gerakan mahasiswa 1966, dalam *mistifikasi* sejarah politik Orde Baru, dianggap memiliki peran yang besar dengan *bekerjasama dan bahu-membahu* bersama ABRI menumbangkan rejim Soekarno. *Koalisi* mahasiswa ABRI mulai retak ketika konsolidasi kekuasaan Orde Baru mulai stabil dengan melakukan *restruturisasi politik kenegaraan* denngan penerapan program depolitisai massa.

Konsolidasi kekuasaan Orde Baru ini memunculkan dua alternatif dikalangan aktivis mahasiswa Angkatan 66 dalam menentukan peran politiknya. Alternatif *pertama* adalah turut serta *menik mati* hasil perjuangan dengan masuk dalam birokrasi dan DPR, seperti yang dilakukan oleh Cosmas Batubara, Sarwono Kusumaatmaja dan Rahman Tolleng (meskipun akhirnya ia tidak betah). Alternatif *kedua* adalah menolak untuk *menikmati* hasil perjuangan dan tetap melanjutkan fungsi intelektualnya sebagai kontrol sosial, yang dilakukan Soe Hok Gie, Arief Budiman dan Imam Waluyo.

Kekuasaan Orde Baru yang terkonsolidasi mulai menunjukkan watak yang *represif* ketika ideologi *pembangunan* melegitimasikan *otoriterisme* negara. Arief Budiman dan eks aktivis angkatan 66 yang berada diluar pagar kekuasaan mulai melakukan kritik pada awal tahun 1970-an. Kritik-kritik yang dilontarkan pada waktu itu masih bersifat kultural. Mereka mengkritik *nepotisme, korupsi* dan *modal asing*. Gerakan moral yang pada awalnya bersifat *sporadis* ini akhirnya menjadi lebih terorganisir dan politis ketika mulai melibatkan massa mahasiswa di kampus-kampus dan munculnya konflik intern dielite kekuasaan.

Kondisi politik pasca MALARI yang mulai stabil selama hampir 3 tahun kembali menunjukkan dinamikanya menjelang PEMILU 1977 dan sidang Umum MPR 1978. Gerakan mahasiswa ini kembali marak dengan tuntutan-tuntutan politik, yang langsung pada penolakan terhadap kepemimpinan nasional. Seperti juga pada periode MALARI, maraknya aktivitas politik mahasiswa sebagai akibat konflik intern di elite politik. Hasil dari gerakan ini adalah pengadilan politik mahasiswa pada tahun 1978 terhadap beberapa pimpinan *Dewan Mahasiswa* di berbagai perguruan tinggi. Gerakan ini juga berdampak pada pembekuan *Dewan Mahasiswa* yang menjadi sarana kegiatan poltik mahasiswa.

Dari pengalaman politik gerakan mahasiswa satu dasawarsa lebih pada periode kekuasaam Orde Baru, maka dilaksanakan *regulasi politik* perguruan tinggi dengan penerapan NKK/BKK. Dunia kemahasiswaan benar-benar terkendali dengan penerapan NKK/BKK. Hampir selama satu dasawarsa mahasiswa bungkam terhadap realitas sosial. Aktivitas lembaga kemahasiswaan intra kampus tak lebih sebagai perpanjangan tangan birokrasi, sementara organisasi mahasiswa ekstra kampus tak berbeda nasibnya karena harus juga menerima regulasi politik keormasan. Satu-satunya lahan aktivitas politik mahasiwa adalah kelompok studi, diluar pagar kampus.

Dengan media kelompok studi, para aktivis mahasiswa yang menjadi masyarakat minoritas dikampus mencoba bergulat dikancah pemikiran. Refleksi terhadap aktivitas politik mahasiswa pada Orde Baru memunculkan kesadaran dan perspektif baru tentang sejarah kelahiran Orde Baru yang menghasilkan *demistifiasi* gerakan mahasiswa 1966, mengkritik Malari dan gerakan mahasiswa 1977 - 1978 lebih berorientasi pada kekuasaan dan jauh dari rakyat yang diperjuangkan. Namun aktivitas politik teoritis ini meminjam istilah *Denny JA-* mulai dirasakan sebagai kegiatan yang *masturbasif*. Muncul kritik terhadap aktifitas ini, seiring dengan mencuatnya beberapa kasus tanah dimasyarakat, karena kelompok studi tidak mampu menjawab problema masyarakat.

Beberapa aktivitas mahasiswa mulai mencoba untuk melihat realitas sosial masyarakat yan selama ini *dinikmatinya* hanya lewat bacaan dan diskusi dengan terjun langsung kedaerah-daerah kasus ketidakadilan. Dengan berbekal teori-teori kritis yang dianggap kiri oleh pemerintah mereka mencoba melakukan pengorganisasian dan penyadaran dikalangan rakyat. Istilah rakyat dianggap lebih tepat untuk menyebut masyarakat yang tertindas. Hasil dari aktivitas empiris mahasiswa ini kemudian diaktualisasikan lewat *advokasi* dan aksi yang

dilakukan bersama-sama oleh mahasiswa, rakyat dan LSM (yang merupakan wadah mantan aktivis mahasis wa). Maka tidak mengherankan jika pada dasawarsa 1990-an ini gerakan mahasiswa lebih berwatak k rakyatan.

Mencuatnya kasus-kasus tanah seperti : Kedung Ombo, Kacapiring, Cimacan, Badega, Majalengka dan ain-lain adalah hasil kerja mahasiswa. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini, para aktivitas mahasiswa mulai berani merambah kawasan yang "rawan politik" yaitu dengan melakukan pengorganisasian dan penyadaran dikalangan buruh.

Keterlibatan mahasiswa pada kasus-kasus lokal ini juga disebabkan oleh semakin meratanya aktivitas politik mahasiswa di semua daerah, sehigga mampu merespon kasus-kasus yang muncul disemua daerah. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika sekarang kita melihat tingginya frekwensi aktivitas politik mahasiswa di kota Solo, Salatiga, Semarang, Malang, Jombang, Jember, Kediri dan kota-kota lainnya, dimana pada periode sebelumnya hampir tidak terdengar aktivitasnya.

Merebaknya gerakan mahasiswa yang berwatak kerakyatan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik negara sehingga kemunculannya selalu menimbulkan kecurigaan pemerintah. Dalam setiap kasus yang muncul ke permukaan , pertanyaan klasik yang terlontar dari penguasa bukan "mengapa kasus itu muncul", melainkan "siapa yang menunggangi".

Ini merupakan bukti kecurigaan penguasa terhadap munculnya kasus yang diangkat rakyat bersama mahasiswa. Mencuatnya isyu "gerakan mahasiswa tahun 1990-an kekiri-kirian " merupakan cermin kerakyatan. Negara kembali menggunakan senjata politik pamungkasnya dengan menuduh "kiri". Senjata ini sering dipakai oleh negara untuk melegitimasikan tindakan represif terhadap segala aktivitas politi yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Daerah genangan Waduk Kedung Ombo dianggap bekas basis PKI ketika rakyat Kedung Ombo memprotes ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah dan sekarang gerakan mahasiswa "dianggap menggunakan cara-cara PKI dan kekiri-kirian" karena melakukan pembelaan terhadap rakyat tertindas.

Wahyu Susilo
Mantan mahasiswa Sejarah Fak. Sastra UNS, peneliti pada Social Analysis and Research Institute (SARI) Solo.

BUDAYA MENYOROT KEKUASAAN

Studi tentang kekuasaan yang berkaitan erat dengan masalah-masalah kebudayaan dikemukakan oleh *Mitchel Foucault (1980)*, mengkonseptualisasikan bahwa dalam bentuk apapun kekuasaan senantiasa memproduksi budaya politik dalam bentuk simbol-simbol. Tetapi sebaliknya nilai-nilai simbolik tersebut senantiasa mencerminkan kembali besar kecilnya kekuasaan.

Fenomena yang terjadi dalam sejarah kekuasaan raja-raja Jawa nampaknya juga senantiasa diwarnai munculnya produk-produk budaya politik yang mencerminkan legitimisme besarnya sebuah kekuasaan. Dunia simbolik yang hadir dalam sejarah Jawa begitu kuat mencuat dalam permukaan kekuasaan raja-raja Jawa.

Dengan demikian disatu pihak budaya politik kekuasaan senan tiasa tunduk pada produksi kebenaran simbol-simbol kekuasaan , tetapi dilain pihak dia juga mengingkari simbol-simbol kekuasaan yang dikemas dalam kolusi menghalalkan segala cara. Budaya simbolik yang dikemas dalam wujudnya sebagai legitimisme kekuasaan senantiasa hadir dan diramaikan disaat terjadi pasang surut munculnya dinasti baru.

Dalam kondisi semacam ini kita sangat sulit memisahkan antara bentuk-bentuk kekuasaan yang simbolik dengan yang aktual, atau dengan kata lain mana yang mencerminkan budaya poitik dengan kekuasaan politik sulit dibedakan. Dalam pengertian semacam ini maka budaya politik dari produk birokrasi tentu saja erat hubun gannya dengan praktek-praktek suatu kekuasaan politis. Demikian maka kita sering dihadapkan pada dilema diantara kebenaran simbol kekuasaan dengan kolusi menghalalkan segala cara dari satu di nasti. Mengambil contoh dari dua dinasti kekuasaan republik ini antara simbol-simbol legitimisme "Demokrasi Terpimpin" rezim Bung Karno dengan "Demokrasi Pancasila" rezim Soeharto kita sulit menentukan nilai pembenarnya. Padahal keduanya memiliki unsur- unsur kolusi tadi.

Dalam konteks sejarah Jawa, jatuh bangunnya suatu dinasti kekuasaan senantiasa diwarnai oleh intrik-intrik politik yang melibatkan dua unsur di atas yang membentuk legitimasi politik. Siapapun yang membentuk dinasti kekuasaan baru, dari kalangan mana saja ia senantiasa menciptakan etika "priyayi".

Memang benar tesis *Heather Sutherland,* bahwa banyak kalangan priyayi telah menyumbang perkembangan dan kegiatan kultural politis dalam dimensi kekuasaan Jawa. Oleh kerena itu ia mampu menyingkap beberapa informasi penting mengenai tingkatan evolusi priyayi dalam pemerintahan di Jawa.

Kita ambil contoh proses suksesi kekuasaan Jawa selama periode pemerintahan kerajaaan Demak, walaupun mampu membangun dinasti baru mereka senantiasa menghadapi kekuatan tandingan lokal yang sangat otonom, yaitu rezim Panembahan Sedo Lepen. Dalam konteks ini dua kekuatan telah melahirkan budaya "priyayi" yang saling berhadapan, yaitu dalam bentuk simbol-simbol legitimasi kekuasaan. Dengan kata lain legitimasi budaya priyayi rezim sultan berhadapan dengan kekuatan tandingan budaya "priyayi" Panembahan.

Untuk menganalisa dunia simbolik yang diciptakan dari dua kekuatan yang hadir dalam sejarah Jawa ini kita sulit menentukan produk kebenaran simbol-simbol kekuasaan mereka dan sulit pula menentukan simbol kolusi yang menghalalkan segala cara. Karena keduanya saling membenarkan *folklore-folklore* yang berdimensi legitimisme itu. Persoalannya sekarang terletak pada dinasti siapa yang kuat, merekalah yang menentukan kebenaran kolusi tersebut.

SEJARAH KEKUASAAN DI INDONESIA

Selama periode pergerakan nasional *counter elite* yang mencuat dalam permukaan sejarah telah dipelopori oleh organisasi sosial politik yang bersifat egaliter : Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Mereka berhadapan dengan kekua tan resmi yang berkolusi antara pemerintah Kolonial dengan pen guasa-penguasa pribumi. Dengan kata lain budaya "priyayi" telah berhadapan dengan budaya lokal sebagai kekuatan tandingan. Tidak diingkari bahwa kekuatan Soekarno dan Hatta yang kharismatik pada era pasca

kolonial, telah dibentuk pada saat kolusi kekuasaan yang syah mulai menunjukkan kelemahan *folklore* kekuasaan mereka.

Peluang kondisi sosial politik Hindia Belanda yang meruntuhkan pamor pemerintahan Kolonial, memberi kesempatan kebangkitan kharisma Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat parlemen Belanda. Inilah fenomena jatuh bangunnya kekuatan budaya *egalitarian* yang memperoleh otonomi lokal berhasil menjatuhkan kekuasaan yang sah, yang menciptakan budaya politik elit "priyayi". Suksesi yang terjadi senantiasa diwarnai oleh situasi konstitusional yang berdimensi dialektis, yaitu: evolusi dan revolusi.

Sejarah kekuasaan Indonesia periode pasca kolonial baru diwarnai oleh munculnya dua dinasti penguasa, yaitu rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Sejarah mencatat, suksesi yang terjadi diantara keduanya tidak berjalan menurut proses evolusi pergantian kekuasaan, melainkan melalui revolusi politik. Dengan kata lain pergantian kekuasaan itu bisa di analisa melalui pendekatan prak tek kolusi *counter elite*. Kekuasaan sah yang diperjuangkan Sukarno telah dirintis melalui jatuh bangunnya kabinet liberal selama periode 1950-1959. Selama sembilan tahun sejarah ketata negaraan Indonesia tercatat puluhan kali pergantian kabinet liberal. Situasi semacam ini yang membentuk faktor-faktor kondi sional mengapa Soekarno melegitimasi hadirnya konsep "Demokrasi Terpimpin". Ketika sejarawan menganalisa dan memperbandingkan faktor kondisional kabinet liberal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka konsep Demokrasi Terpimpin sebagai legitimasi budaya tandingan keberadaannya menjadi sah-sah saja. Tetapi manakala intepretasi Demokrasi Terpimpin melahirkan kekuasaan presiden seumur hidup, selama periode 1959-1965, maka budaya tandingan yang bersifat egaliter Soekarno telah berubah menjadi budaya politik "priyayi" yang menghalalkan segala cara. Kebenaran legi timasi kembali kepada konsep semula bahwa kekuasaan yang kuat akan membenarkan segala cara. Dalam kondisi semacam itu siklus sejarah akan mencatat munculnya kembali *counter elite* yang mengibarkan panji demokrasi, sebagai perwujudan budaya *egaliter*.

Situasi dan kondisi yang membenarkan hadirnya *counter elite* baru dalam sejarah telah mencatat berulangnya budaya politik kekuasaan raja-raja Jawa. Tampilnya Soeharto dalam era Orde Baru bisa diparalelkan dengan kepemimpinan *counter elite* : Ken Arok, Panembahan Sedo Lepen, Hadiwijaya (Jaka Tingkir), Sutawijaya, Ki Ageng Mangir, dan Soekarno.

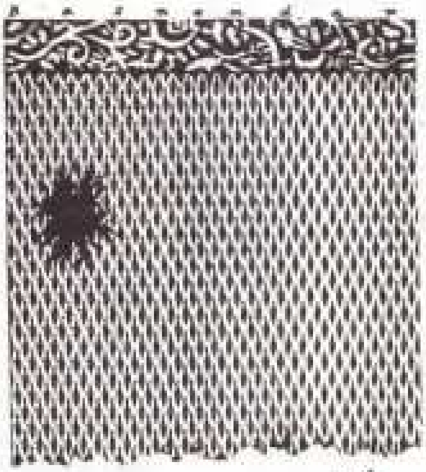

Legitimasi yang dibangun oleh *counter elite* baru rezim Soeharto dicuatkan lewat dikotomi tatanan masyarakat yang disebut "Orde Sosial Lama dan Orde Sosial Baru". Orde sosial yang baru mencuat kepermukaan setelah tahun 1965, sengaja dimunculkan dalam kondisi dikotomis. Artinya, pengertian tatanan masyarakat lama cenderung mengandung nilai-nilai ketatanegaraan yang bersifat inkonstitusional, keluar ideologi Pancasila dan berdimensi kekua saan absolut.

Dengan demikian wujud dikotomis orde sosial baru membutuhkan legitimasi budaya egaliter yang bisa diterima oleh seluruh lapi san masyarakat. Antara lain munculnya isu-isu sentral *(folklore)* Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi negara dan demokrasi Pancasila sebagai alat legitimasi pengganti Demokrasi Terpimpin.

Ini baru satu interpretasi yang berpijak diatas landasan catatan sejarah kekuasaan Jawa. Yang jelas sebagaimana telah dikonseptualisasikan diantaranya oleh *Mitchel Foucault*, bahwa munculnya kekuatan tandingan senantiasa berpegang pada legitimasi budaya politik *egaliter*. Dalam situasi yang demikian mereka senantiasa berhadapan dengan kekuatan yang mempertahankan budaya politik priyayi.

Sudarmono
Dosen Fakultas Sastra UNS

George Junus Aditjondro :

DEMOKRATISASI KITA ELITIS DAN SEKTORAL

Asia Pacipic Conference on East Timor (APCET) yang berlangsung di Manila 31 Mei - 3 Juni lalu kembali mencuatkan namanya ketika dosen pasca sarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tersebut masuk sebagai salah satu pembicara yang diundang dalam konperensi tentang propinsi paling bungsu di Indonesia. Bersama rekan-rekannya lainnya, seperti Princen, Mulyana dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, George akhirnya memutuskan tidak memenuhi undangan tersebut. Meski demikian ia membuat petisi kepada Pemerintah Filipina lewat Kedubesnya di Jakarta untuk memprotes tindak pencekalan bagi peserta asing konperensi Timor Timur tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Namanya memang tidak dapat dilepaskan dari masalah Timtim setelah hasil penelitiannya tentang Timtim dipublikasikan oleh media Australia. Sebagai cendekiawan yang banyak menumpahkan perhatiannya pada masalah Indonesia bagian timur, George juga pernah menerima penghargaan Kalpataru tahun 1987 karena pengabdiannya pada pelestarian lingkungan hidup. Berbagai jabatan penting pernah diembannya seperti Wakil Ketua Presidium WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD Irja) yang termasuk pendiri INGI (International Non Govermental Organization Forum on Indonesia -sebuah forum LSM di Indonesia).

Disela kesibukannya, doktor lulusan Universitas Cornel Amerika Serikat kelahiran 27 Mei 1946 ini menerima Mahfudin dan Nanang BS dari Kentingan usai berbicara dalam sebuah seminar di UKSW. Berikut petikannya :

Bagaimana demokratisasi di Indonesia menurut Anda?

Demokratisasi di Indonesia sekarang ini masih terbatas, seperti pada segelintir kelas menengah -itupun hanya di pulau Jawa. Juga tidak semua kampus turut dalam soal ini. Jadi sifatnya sangat elitis, hanya segelintir saja yang melibatkan diri dalam demokratisasi, sehingga kalau yang segelintir ini *capek*, lantas apa yang akan kita dapat?

Kendala sistem?

Sistem tidak bisa dijadikan alasan. Dulu, Tan Malaka juga menghadapi sistem yang tidak memungkinkan untuk demokratisasi.

Apa maksud demokratisasi masih elitis dan sektoral?

Bersifat elitis karena berasal dari kalangan kampus, yang jarang mengangkat *issue* dari luar Jawa. Misalnya, tidak ada korelasi antara mereka yang memperjuangkan nasib Marsinah dengan mereka yang memperjuangkan nasib buruh di Selat Malaka. Gerakan kita tidak menasional. Kalaupun gerakan yang berbasis di Jawa mengklaim sebagai gerakan nasional itu semata karena publisitas pers.

Bagaimana dengan peran mahasiswa sebagai pejuang demokratisasi?

Itu mitos mahasiswa sebagai pendobrak dalam pemikiran *Leninistis* bahwa kalangan intelektual-lah yang selalu memimpin aksi massa. Namun tidak selalu kaum intelektual yang memimpin karena dari massa sendiri akan muncul pemimpin yang kemudian biasa disebut *intelektual tradisional* atau *intelektual organik*. Memang di Indonesia kita kurang mempercayai intelektual organik karena *arogansi* kaum intelektual pada umumnya, yang terbuai dengan mitos angkatan 1908 dan 1966. Mitos itu seolah kampuslah yang memimpin orang kampung.

Bukankah secara umum mahasiswa telah memberi kontribusi bagi demokratisasi ?

Saya masih ragu. Dalam gerakan mahasiswa secara *diakronis* akan selalu muncul generasi baru dan koreksi. Apakah betul mahasiswa sebagai aktor utama? Karena faktor militer juga perlu diperhatikan, misalnya pada 1966 ingin diberi kesan bahwa mahasiswa lah yang memperjuangkan perubahan.

George Junus Aditjondro di Kamar kerja yang full book.

Apakah lembaga kemahasiswaan dikampus bisa memperjuangkan demok ratisasi?

Sulit kalau lembaga kemahasiswaan itu bagian dari birokrasi kampus. Pengelompokan mahasiswa dalam unit-unit kegiatan sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu dibiarkan otonom, sehingga memungkinkan mereka berpikir kritis.

Bagaimana karakter antara gerakan mahasiswa 1966 dengan gerakan mahasiswa sekarang?

Jauh sekali. Kita lihat aktor pemimpinnya, tahun 60-an pemimpinnya sekaligus adalah pimpinan ormas, ini *sentralistis* sedang tahun 80-an pemimpinnya menjadi beragam. Ideologi tahun 66 adalah pro kapitalis anti komunisme. Ideologi tahun 80-an atau 90-an alergi dengan kapitalis. Namun sayangnya belum bisa merumuskan *formulasi sosialisme* seperti apa, yang ada hanya penolakan terhadap kapitalis. Ada semacam raba-raba untuk mencari strategi ekonomi alternatif, dan sayangnya kurang diberi waktu untuk berkontemplasi. Tidak cukup hanya menyatakan sosialisme, karena sosialisme bisa berarti *Leninisme*, juga *Gandhisme* yang kerakyatan, juga ada sosialisme demokrat *ala* Skandinavia.

Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat bahwa tugas utama maha siswa adalah kuliah?

Dosen hendaknya tahu bahwa proses pendidikan terjadi di dalam dan luar kampus. Bukan hanya belajar dari buku-buku tapi juga mempelajari ilmu dari masyarakat. Karena pendidikan tidak semata untuk mengembangkan ketrampilan tapi juga mengembangkan kepemimpinan.

Mayoritas mahasiswa kan membisu terhadap masalah demokratisasi, apakah karena sistem SKS?

Lagi-lagi yang disalahkan sistem. Ormas juga salah. Ormas selama ini mengidolakan, misalnya di HMI bagaimana caranya menjadi seperti Akbar Tanjung atau PMKRI seperti Sofyan Wanandi. Anak Indonesia sejak SD dididik untuk menjadi robot. Yang diajarkan di sekolah bagaimana menjadi robotnya negara atau robotnya sistem ekonomi, bukan bagaimana menjadi aktifis. Makanya hanya segelintir mahasiswa yang sadar dalam memperjuangkan demokratisasi.

Atau karena cara berpikir mahasiswa?

Secara *dialektis* dari pendekatan kultural, baik mahasiswa kaya maupun miskin selalu ingin cepat menyelesaikan kuliah dan segera memberikan kontribusi balik bagi keluarganya. Itu hal realistis yang tidak perlu dilecehkan. Secara makro diantaranya adalah karena sistem pendidikan kita yang penuh dengan *iming- iming.*

George yang semasa muda aktif berorganisasi ini sempat kuliah di Fakultas Teknik UNHAS dan Akademi Teknik Semarang, sampai akhirnya pindah ke jurusan Teknik Elektro yang hanya betah sampai tahun keempat. Pengalamannya di pers mahasiswa membawa tokoh yang masuk dalam buku "Apa dan Siapa Orang Jawa Tengah" ini menjadi wartawan Tempo selama 10 tahun. Dengan ditemani istrinya Esti Bernedetta dan putra tunggalnya Enrico, George menempati sebuah rumah kecil di Jl. Cemara Dua Salatiga. Pria asli Pekalongan yang berjanggut tebal ini memang gemar menjelajah langsung ke daerah-daerah untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tentang validitas penelitian, pernah Pangdam Udayana mengatakan penelitian Anda tentang Timtim tidak valid, bagaimana?

Sekarang apakah dia cukup kompeten untuk bicara soal peneli tian? Yang namanya penelitian adalah pengumpulan data sekunder, dengan demikian orang lain pun bisa bicara soal Timur Tengah atau yang lain.

Bagaimana pendapat Anda tentang suksesi Rektor?

Pemikiran yang berasal dari Jawa Kuno menganggap bahwa pemimpin akan membawa kharisma. Kharisma pemimpinlah yang mengubah semuanya bagaikan *lampu ajaib aladin.* Kalau kita menganggap suksesi adalah perubahan konfigurasi, perubahan mekanisme dan aturan main, maka kita perlu bekerja dan berpikir lebih keras. Itu semua adalah esensi demokratisasi. Misalnya apa yang diperlu kan untuk demokratisasi di UNS? Apakah hanya mengganti figur pemimpin atau sistem pemilihan rektornya? Misalnya, kenapa selama ini dalam pemilihan rektor hanya hak milik dosen sedang mahasiswa tidak memiliki hak suara. Padahal kan rektor merupakan *bos* seluruh civitas akademika.

Di Indonesia kita kurang mempercayai intelektual organik karena arogansi kaum intelektual pada umumnya, yang terbuai dengan mitos angkatan 1908 dan 1966.

Bagaimana dengan harapan rektor baru akan menciptakan suasana demokratisasi kampus?

Kita hendaknya tidak *njagake* pada figur rektor untuk hal yang demikian. Itu pemimpin sentris. Lebih baik pada sistemnya. Marilah kita merubah sistem senat sehingga yang menjadi senator bukan dekan tetapi orang yang dipilih langsung, kemudian juga mengusahakan bahwa mahasiswa dan karyawan punya wakil yang representatif. Sehingga setelah ada rektor baru dari sistem seperti ini, sistem pun menjadi lebih baik. Kalau kita mengharapkan pemimpin -presiden atau rektor- membawa suatu pencerahan demokratisasi, maka kita terlalu *njagake* sesuatu yang belum pasti. Ini konsep pemikiran *ratu adil.* Selama ini yang diperdebatkan dalam suksesi bukan sistemnya tetapi lebih banyak menyorot orangnya.

Bagaimana formulasi untuk mengubah sistem suksesi?

Lakukan dengan diskusi dan menciptakan media alternatif. Misalnya membuat buletin yang mengubah sistem pemilihan umum dengan sistem distrik, siapa saja yang menjadi *public figure* untuk menciptakan opini publik menuju ke arah kebebasan partai. Dengan demikian ada partai yang tidak berkuasa secara nasional, tapi di tingkat daerah berkuasa. Misalnya sistem *federatif* yang ada di Amerika Serikat. Kadang bicara sistem *distrik* atau *federatif* jarang ada yang berani. Jadi sekarang biar saja orang lain melihat pemilu atau suksesi yang akan datang sekadar melihat figur Habibie atau Try atau X.

Ada sugesti untuk mahasiswa UNS tentang suksesi yang belum demok ratis?

Hendaknya mahasiswa itu lebih kritis tentang suksesi itu. Termasuk juga dengan adanya suksesi rektor yang akan terjadi di UNS. **(pbl)**

MEMAKNAI NASIONALISME KITA

Muchamad Yulianto

Dalam konteks negeri kita nasionalisme selalu bergandengan dengan integrasi, apalagi bila melihat demikian pluralitasnya kondisi Indonesia. *Dhaniel Dhakidae* mengatakan bahwa nasiona lisme adalah gerak menuju integrasi di atas dasar tertentu. Sedang nasionalisme dalam gerak aslinya dalam sejarah Eropa berjalan seiring dengan kesatuan agama dan wilayah. Karenanya dari pendapat tersebut, agama bisa dijadikan sumber legitimasi bagi perjuangan maupun kekuasaan bangsa atau wilayah yang didia minya. Dalam intregrasi sering dianalogkan dengan keseragaman, padahal keseragaman yang tidak memberi kesempatan lain adalah bentuk cacat dari suatu integrasi.

Karena ada kepentingan tertentu maka integrasi dianggap sudah selesai dengan keseragaman- keseragaman hukum dan bahasa. Namun dengan mengabaikan realita bahwa keragaman lebih memerlukan integrasi dengan dimensi lain, yaitu keadilan ekonomi yang bisa jadi lem perekat. Jurang antar tingkat hidup yang selama ini terjadi adalah bentuk pengingkaran terhadap integrasi.

Orang tak akan pernah lupa ungkapan *Disraeli* tentang seman gat kebangsaan atau nasionalisme, *right or wrong is my country*. Namun disini kehadiran negara sering diidentikkan dengan bangsa, dan nampaknya sosok negara atau pemerintahannya menjadi demikian kuat dan seakan tak bisa diganggu gugat. Sementara bangsa tidak sama dengan negara, artinya kebangsaan muncul dari arus rakyat, merupakan perekat bagi solidaritas rakyat. Sebaliknya term negara adalah lahir dari atas alias dari penguasa.

Jend. (Purn) Edi Sudrajat berpendapat bahwa rasa kebangsaan tidak hanya merefleksikan bahwa seseorang adalah bagian dari masyarakat bangsanya, tetapi sekaligus mengandung unsur loyalitas untuk menjaga integritas dan identitas dari masyarakat bangsa itu. Sementara *Ipong S. Azhar* menyahuti bahwa secara psikologis nasionalitas biasanya akan membangkitkan emosi pembelaan dan semangat rela berkorban yang disebut *patriotisme*.

Melihat posisi kaum muda dalam melanjutkan sejarah, seman gat kebangsaan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, pekerjaan maupun interaksi sosialnya. Perlu dilihat kecerdasan yang berkaitan dengan rasa nasionalisme. Menurut *Jurgen Habermas* bahwa ada dua model kecerdasan, *pertama* kecerdasan *emansipatorik* artinya kecerdasan

akal budi yang menimbang jernih, dipadukan dengan nurani yang menggugatnya, untuk menanyakan apa sumbangan kecerdasan untuk kemanusiaan? Disini setiap individu berproses menjadi cendekiawan, yang menggugat rasionalitas dalam sumbangannya untuk semakin teremansipasinya orang, semakin merdekanya orang dari kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, ketakutan bicara kritis. Jadi kecerdasan itu diabdikan bagi kemanusiaan. Maka tak diragukan lagi nasionalisme orang semacam ini.

Lain halnya dengan yang *kedua*, kecerdasan *instrumental* artinya rasionalitas tukang, yang dalam keadaan akal budi cuma mau mengkaji kehidupan secara *dangkal* pragmatis, teknokratis dan praktis artinya semuanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Rasionalitas semacam ini termanifestasi pada *jalan-jalan pintas* dalam menempuh hidup tanpa mempedulikan nasib sesama, seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, nepotisme, otoriter dan tak kenal kompromi dalam persoalan kemanusiaan. Nah kalau ada pejabat semacam ini justru perlu dipertanyakan nasionalismenya, atau siapa saja yang bersikap demikian layaknya kolonialisme bagi bangsa sendiri.

Bentuk interaksi sosial dalam pengertian luas yang diarahkan ke masyarakat kapitalistis -semua dinilai berdasar materi- menye babkan gaya hidup liberal dan cenderung egois dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, mulai nampak pada hasil-hasn apa sumbangan kecerdasan untuk kemanusiaan?

Disinilah maka setiap individu berproses menjadi kecendekiawanan, yang menggugat rasionalitas dalam sumbangannya untuk semakin teremansipasinya orang, semakin merdekanya orang dari kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, ketakutan

Kehadiran negara sering diidentikkan dengan bangsa, dan nampaknya sosok negara atau pemerintahannya menjadi demikian kuat dan seakan tak bisa diganggu gugat.

bicara kritis. Jadi kecerdasan itu diabdikan bagi kemanusiaan. Maka tak diragukan lagi nasionalisme orang semacam ini. Lain halnya dengan yang kedua, kecerdasan instrumental artinya rasionalitas tukang, yang dalam keadaan akal budi cuma mau mengkaji kehidupan secara "dangkal" pragmatis, teknokratis dan praktis artinya semuanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Rasionalitas semacam ini termanifestasi pada "Jalan-jalan pintas" dalam menempuh hidup tanpa mempedulikan nasib sesama seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, otoriter dan tak kenal kompromi dalam persoalan kemanusiaan. Nah kalau ada pejabat semacam ini justru perlu dipertanyakan Nasionalismenya, atau siapa saja yang bersikap demikian layaknya kolonialisme bagi bangsa sendiri.

Bentuk interaksi sosial dalam pengertian luas yang diarahkan kemasyarakat kapitalistis - semua dinilai berdasar materi - menyebabkan gaya hidup liberal dan cenderung egois serta menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, mulai nampak pada hasil-hasil pembangunan yang cenderung teknokratis perlu segera kita antisipasi. Model begini sering berlindung dibalik nasionalosme yang bersifat pragmatis, dimana tumbuh dan berkembang berkat kemajuan-kemajuan peradaban serta kesadaran politik yang relatif telah dinikmati seluruh anggota masyarakat di dunia ini.

Benarkah nasionalisme dalam era globalisasi semakin mengalami pengaburan makna ? Kita buktikan saja !

Mahasiswa Komunikasi Massa UNS, Aktifis KSM (Kelompok Studi Mangkubumen) Surakarta

POTRET PERJUANGAN PERS MAHASISWA

Kristianto Martono

Dalam konteks sejarahnya pers mahasiswa tumbuh dan berkem bang ditengah kekuatan sejarah. Ia lahir dan terbentuk, tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan sejarah dalam negeri, tapi juga kekuatan sejarah internasional. Dengan demikian, pers mahasiswa tidak mungkin mengabaikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di masyarakatnya. Karena itu bila pers mahasiswa mau membumikan dan memperjuangkan peranan sosial politisnya seperti yang pernah diembannya pada masa lampau maka pers mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang matang terhadap peran politisnya yang berhasil dilakukannya di era 70-an.

Dengan mengacu pada konteks sejarah tulisan ini mencoba menyoroti sampai sejauh mana peranan pers mahasiswa dalam sejarah gerakan mahasiswa dan berfungsi dalam pembentukan ideologi maha siswa.

Pada dekade 50-an pers mahasiswa mengalami perkembangan sangat pesat. Atas prakarsa majalah GAMA-UGM yang dipimpin Teuku Yakob berhasil diselenggarakan Konferensi Pers Mahasiswa I yang menghasilkan dua organisasi yaitu *Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia* (IWMI) dan *Serikat Pers Mahasiswa Indonesia* (SPMI).

Namun karena IWMI dan SPMI dianggap tidak efisien maka kedua wadah pers mahasiswa nasional itu akhirnya dibubarkan, dan dalam Konferensi Pers mahasiswa Nasional II di Kaliurang tahun 1958 berhasil dibentuk *Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia* (IPMI) yang diketuai Nugroho Notosusanto.

Pada dekade 60-an terutama stelah terjadi peristiwa G30SPKI. pers mahasiswa makin menampakkan keberadaan dan peran politisnya.

Pers mahasiswa yang cukup terkenal pada masa itu antara lain Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi, Angkatan 66, Angkatan Baru. Tiras koran mahasiswa pada masa itu mencapai puluhan ribu eksemplar, jauh melebihi tiras koran umum seperti Kompas, Sinar Harapan yang hanya beroplah sekitar dua ribu eksemplar.

OPINI

Harian Kami yang dipimpin Nono Anwar Marakim berkembang pesat menjadi koran nasional terpenting, ini berkat *bargaining positionnya* yang kuat dengan KAMI. Juga koran Mahasiswa Indonesia yang dipimpin Rahman Tolleng pada masa itu dikenal sebagai koran mahasiswa yang paling galak dalam mengkritik pemerintah. Koran koran mahasiswa pada masa itu benar benar mampu menguasai opini publik, mereka juga sangat menguasai informasi nasional dan internasional. Yang diangkat koran-koran mahasiswa pada nmasa itu kebanyakan tentang isyu isyu politik disertai analisa politik yang tajam. Mereka bahkan mempunyai peran politis yang sangat besar sehingga opini politik koran mahasiswa pada saat iti mampu mempengaruhi proses kebijaksanaan pemerintah.

Pers Mahasiswa dekade 70-an juga mencatat prestasi yang layak dibanggakan, dimana kelembagaan pers mahasiswa mampu mengambil peran politis yang sangat besar dalam mendinamisir gerakan mahasiswa. Selama dekade 70-an ini berhasil dilaksanakan tiga kali Konggres IPMI.

Jika dekade 70-an merupakan masa-masa kejayaan bagi pers mahasiswa, maka dekade 80-an merupakan masa-masa suram bagi kehidupan pers mahasiswa. Pers mahasiswa dekade 80-an ini bisa diibaratkan *Hidup segan tapi mati pun tak mau*. Sampai menjelang tahun 1985 IPMI benar-benar telah *dikooptasi* penguasa. Setelah melewati masa masa konsolidasi yang cukup lama dari tahun 1985-1989 maka upaya konsolidasi dan pembentukan kembali jaringan pers mahasiswa nasional ternyata berujung pada anti klimaks yaitu dengan gagalnya rencana Kongres VI di Lampung karena dilarang penguasa.

Dari potret panjang sejarah perjuangan IPMI ini terlihat jelas bahwa IPMI sebagai wadah pers mahasiswa ternyata tidak pernah diberi ruang gerak bahkan selalu mendapatkan tekanan dan penindasan serta pembreidelan dari penguasa.

Koran-koran mahasiswa pada era 80-an ini meski ada tapi gaungnya tak pernah sampai ke masyarakat, bisa dikatakan pers mahasiswa pada era ini tengah mengalami *impotensi politis* karena berbagai bentuk tindakan penguasa yang sangat *represif*.

Mungkin dari catatan perjalanan sejarah ini kita bisa bela jar banyak dari pendahulu kita dan kita barangkali bisa mengambil hikmah bahwa usaha untuk membangun kekuatan pers mahasiswa bukan saja merupakan pekerjaan yang berat dan melelahkan tapi juga merupakan tanggung jawab dan tugas mulia yang harus kita pikul bersama. (**)

MENUTUP HIDUNG DI PEMANDIAN PENGGING

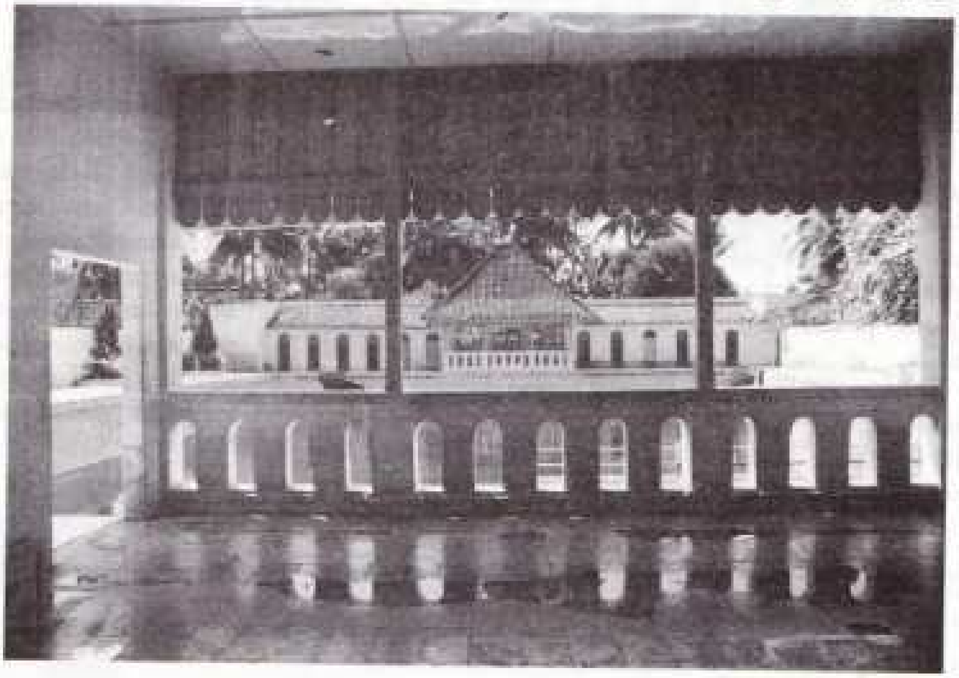

Masih banyak indistri yang tidak ramah lingkungan. Entah karena keengganan atau ketidaktahuan, industri semacam ini jelas mengancam eksistensi kemanusiaan. Terlebih lagi banyak industri yang berdiri di tengah hunian padat penduduk. Jangan "melempar batu " dengan analogi "ayam ataukah telur yang duluan", tapi bagaimana mewujudkan produk yang ramah lingkungan demi menghormati kemanusiaan kita.

SEKITAR KITA

Bagi masyarakat kota Solo dan sekitarnya, Pengging Boyolali mungkin bukan nama yang asing. Karena desa yang terletak kurang lebih 20 km arah barat kota Solo tersebut telah lama dikenal dengan tempat pemandian alam yang bersumber dari mata airnya yang *bening*. *Kungkum* (berendam) dalam jernihnya air pemandian Pengging diyakini sejumlah masyarakat Jawa memiliki *tuah*, seperti *awet muda, mberkahi, enteng jodoh, murah rejeki*, dan sebagainya. Dalam waktu-waktu tertentu, seperti *padusan* menjelang bulan Puasa, *malam Sura*, pemandian tersebut dipenuhi pelbagai kalangan masyarakat yang berharap memperoleh berkah dari pemandian tersebut. Kabarnya tidak sedikit pejabat, pengusaha maupun orang-orang terkenal yang kungkum di malam-malam tertentu. Bahkan Dubes Austria yang mencoba kungkum pun mengagumi keindahan dan kesejukan mata airnya yang bening.

Di lokasi yang berada dalam wilayah Desa Benda Kecamatan Banyudono, Boyolali tersebut juga berdiri sebuah masjid peninggalan Sri Susuhunan Paku Buwono X, yang berjarak hanya sekitar 20 meter dari lokasi Umbul Pengging. Menurut warga setempat dulu mereka sering mengambil air wudlu di sungai-sungai sekitar Mesjid Ciptomulyo yang keadaannya hingga kini masih terawat baik. Desa Benda memang dialiri dua sungai yaitu Karangduwet dan Sungsang.

Namun, sekarang banyak warga yang resah dengan bau busuk dan menggenangnya limbah pabrik tahu dan peternakan babi yang dibuang sembarangan tanpa proses pengolahan limbah ke sungai Karangduwet. *Buangan* berupa limbah sisa produksi tahu dan kotoran babi yang sebagian besar berbentuk padat dan berwarna kehitaman tersebut akhirnya menggenang memenuhi permukaan sungai. Timbunan limbah padat itu akan menyibak dan mengeluarkan bau busuk yang lebih menyengat bila dilempari batu. Tak terhitung banyaknya lalat yang mengerumuni limbah yang menggenang dan beterbangan di sekitar rumah penduduk sepanjang aliran sungai tersebut.

"Banyak lalat dan nyamuk, apalagi kalau sore hari *pas* waktu-waktu *buangan*," papar Surono yang memiliki warung persis dimuka mesjid Ciptomulyo.

Masyarakat di daerah aliran sungai tersebut kini sudah tidak berani memanfaatkan air sungai sekalipun tidak terdapat genangan limbahnya. Karena disamping baunya yang menyengat, airnya ditengarai juga menimbulkan gatal-gatal dibadan. "Dulu waktu kecil kami berwudlu disungai sini. Tapi sekarang sudah nggak berani karena takut gatal-gatal," kata Pardi pada *Kentingan*.

Surono juga menjelaskan beberapa rumah disepanjang aliran sungai ditinggalkan penghuninya yang pindah ke daerah lain karena tidak tahan dengan bau limbah dan lalat yang mengganggu. "Tapi itu kalau orangnya mampu, kalau yang *nggak* punya ... ya tetap tinggal dengan *nahan bau*," jelasnya sambil menunjukkan beberapa rumah kosong.

Didampingi beberapa tetangganya, Surono menjelaskan sudah berulang kali menyampaikan keluhan pada pejabat-pejabat yang bertandang ke desanya, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Bambang, warga lain menambahi, "Dulu pernah ada kegiatan *tarling* (taraweh keliling) dari kabupaten, kami juga *ngadu*. Tapi mereka hanya sekadar janji-janji". Ia bahkan *wanti-wanti* agar *Kentingan* tidak bertamu ke pengusaha tahu, agar tidak *disuguhi panganan* yang enak-enak, seperti tamu-tamu pejabat yang lain.

Desa Benda memang paling banyak memiliki pabrik tahu di antara 15 desa yang berada dalam wilayah kecamatan Banyudono. Menurut Djuwandi, Mantri Polisi Pamong Praja (MPPP) Kecamatan Banyudono, dulu memang banyak industri rumah tangga yang membuat tahu namun kini hanya tinggal beberapa dan sebagian besar ada di desa Benda. Sementara menurut aparat Desa Benda diwilayahnya ada sekitar 11 pabrik tahu, 3 diantaranya yang terbesarlah yang banyak dikeluhkan warga. Beberapa penduduk juga mengusahakan peternakan babi *kecil-kecilan* untuk menampung limbah tahu yang banyak dihasilkan pabrik-pabrik tahu disekitar tempat tinggalnya.

Namun biasanya, pengusaha pabrik tahu tersebut juga memiliki sendiri peternakan babi karena dengan begitu tidak mensia-siakan limbah tahu yang merupakan pakan utama babi. Hal itu juga diakui Maryoto, pengusaha tahu terbesar didesa tersebut yang memelihara 150 ekor babi.

SEKITAR KITA

Gambar dari atas ke bawah: Masjid Ciptomulyo peninggalan PB X, Genangan limbah yang menyengat itu, Salah satu sudut peternakan babi, kungkum di Umbul Pengging yang bening dan sejuk.

Sementara itu Kepala Desa Benda, Mugiyo SM, mengaku belum pernah menerima pengaduan resmi dari warganya, namun pihaknya selalu melakukan pembinaan pada pengusaha tahu/ babi tersebut supaya mengatur limbahnya dengan baik.

"Kewenangan kami memang hanya sebatas itu, menghimbau mereka agar mengurangi limbah dan baunya. Kami *ngga* bisa menutup begitu saja," jelas Mugiyo menanggapi permintaan masyarakat untuk menutup saluran pembuangan. Namun begitu, menurutnya, pihak-pihak terkait seperti Kantor Perindustrian dan Lingkungan Hidup sudah mengecek permasalahan tersebut.

Menerangkan pengaturan limbah, Maryoto mengaku sudah membeli sebidang tanah yang akan dipakai untuk menangani limbah pabriknya namun realisasinya masih menunggu pengarahan dari instansi terkait karena, "Saya *ngga* tahu apa-apa tentang proses pengolahan limbah".

Seperti diakui aparat desa, bahwa meski pabrik tahu tersebut masih dalam skala industri rumah tangga, namun bukan berarti bisa seenaknya mengabaikan lingkungan sekitarnya. Karena kawasan pabrik tersebut juga padat dihuni penduduk, termasuk anak-anak.

Dan terlepas dari latar belakang tradisi *kungkum* di *Umbul Pengging* dan *Umbul Sungsang*, tampaknya warga Benda, Banyudono, Boyolali yang merasakan sengatan busuk limbah tahu/ babi memang berhak merasakan lingkungan tinggal yang bersih dan sehat.

Dan meski limbah pabrik tahu/ peternakan babi lebih banyak dikeluhkan warga sekitar aliran sungai Karangduwet, namun bukan tidak mungkin bau menyengat limbah tersebut juga akan "mencemari" keindahan dan kesejukan pemandian Pengging yang berjarak lebih kurang 500 meter dari aliran limbah terdekat. Bukan tidak mungkin pula, suatu waktu pengunjung obyek wisata pemandian Pengging harus menutup hidung sambil merendam diri, apabila kita begitu tak peduli dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang harus kita kembalikan dengan "utuh", bukan kita wariskan, pada anak cucu kelak. **(putri bawa lestari dari laporan Budi dan Kris)**

Maryoto :
"Terima Kasih karena Memperhatikan"

Pengusaha yang memiliki usaha pabrik tahu sejak 1978 ini mengaku sedang menyiapkan peternakan sapi untuk menggantikan ternak babi yang ada saat ini, yang di samping lebih toleran dengan penduduk sekitarnya yang muslim, ternak sapi juga tidak kalah menguntungkan. "Supaya limbah tahunya tidak terbuang sia- sia. Lagipula kalau ternak babi, saya juga nggak pernah makan dagingnya," kata Maryoto yang asli Desa Benda tersebut.

Bapak lima anak tersebut mengaku mempekerjakan sekitar 10 karyawan bagi usaha pembuatan tahu berkapasitas produksi 5 kwintal kedelai per hari. Menurutnya saat ini sedang diusahakan pembuatan tank (bak penampung) bagi limbah pabriknya, tapi masih menunggu pembinaan dari instansi terkait. Ia sudah menyediakan lahan pekarangan disamping pabrik/peternakannya, namun petunjuk pelaksanaan dari instansi terkait belum juga diterimanya.

"Lha saya kan nggak tahu apa-apa. Apa itu AMDAL saya juga nggak mudeng. Makanya saya juga berterima kasih dengan adanya pengaduan warga, mata saya jadi terbuka " akunya pada Kentingan ditempat tinggal yang terletak didepan pabrik tahunya.

Surono :
"Mahasiswa Silahkan Datang Melihat"

Keluhan akan pembuangan limbah pabrik tahu sudah dirasakan lama oleh warga Desa Benda tersebut, namun celotehan mulut penduduk rupanya kurang diperhatikan aparat pemerintahan setempat, yang menganggap segala sesuatunya masih berjalan sesuai ketentuan.

Jeritan hati tanpa pembuktian rasional dan ilmiah kurang bisa diterima, karenanya, "Kami sangat mengharapkan bantuan dari mahasiswa-mahasiswa agar dapat meneliti keluhan kami," kata Surono. Katanya keluhan-keluhan warga tidak pernah digubris sama sekali. Bahkan ,"Baru dari Kentingan ini yang langsung "membaui" limbah tahu".

Karenanya Ia sangat mengharapkan mahasiswa-mahasiswa dari jurusan industri/ lingkungan dan hukum atau sesuai keahliannya bidangnya mau terjun mengabdikan diri, "Pintu rumah kami terbuka lebar bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin membantu kami". tambahnya.

Menurut pria bertubuh subur yang memiliki usaha warung di samping Umbul Sungsang tersebut dulu warga pernah agak emosi ingin menutup saluran pembuangan, tapi kemudian dicegah Pak Kades. Upaya musyawarah yang ditawarkan Kades tersebut, ternyata tidak membawa perbaikan sama sekali, karena limbah tetap dibuang sembarangan dan tidak memperdulikan keluhan penduduk sekitar sungai.

"Jangan sampai menunggu jatuh korban lebih parah. Sekarang saja anak-anak sering mengeluh deman atau muntaber," harapnya.

Mugiyo SM :
"Kedua Pihak Harus Saling Among"

Menurut Kades Benda masalah pabrik tahu dan peternakan babi ini sejak dulu memang timbul tenggelam, namun menurut pengakuannya pemerintah juga akan membantu dengan menangani proses pembuangan limbah tahu. Sampai saat ini, pihaknya memang belum pernah mempertemukan semua pihak untuk mendialogkan permasalahan limbah.

"Tinggal tunggu waktu dan petunjuk instansi terkait saja, karena para pengusaha itu sudah sepakat akan menangani limbah supaya tidak bermasalah," aku Kades yang membawahkan kurang lebih 4.150 penduduk tersebut.

Mugiyo mengaku memang ada korban demam berdarah, tapi "Kita masih tunggu pemeriksaan Puskesmas tentang penyebab pastinya. Kita kan tidak bisa seenaknya bilang penyakit itu karena limbah pabrik".

Karenanya Mugiyo menginginkan masyarakat dan para pengusaha saling among. "Soalnya pabrik itu kan juga memberikan manfaat." (PBL)

GERAKAN PROTES MAHASISWA

Protes merupakan bagian dari perubahan sosial, yang mengungkapkan ketegangan antara kompleksitas dan fragmentasi hubungan manusia dalam lembaga sosial, ·rta kesenjangan partisipasi dalam tatanan sosial budaya. :ngan demikian protes merupakan cerminan dari konflik yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam kaitan itu, gerakan mahasiswa tidak lain merupakan suatu bentuk perwujudan eksistensi protes itu. Konflik akan pecah jika mekanisme politik yang resmi sudah diupayakan tanpa hasil nyata.

Karakter mahasiswa sebagai intelektual muda yang memiliki sikap kesebayaan yang kuat, mendorong munculnya identitas kegen erasian sebagai agen pembaharuan. Namun bentuk protes terhadap lingkungan dapat dikelompokkan atas dua kategori (*Keniston, 1971*) yaitu *the activist*, kelompok aktifis yang melakukan protes dengan gerakan aksi dan *the alienated*, kelompok yang protes melalui penyalahgunaan obat (narkotik, alkohol) dan perilaku *bohemian*.

Sikap mahasiswa aktifis menurut Sarlito, berbeda dengan yang bukan aktifis. Aktifis cenderung beranggapan mahasiswa selalu menjadi pelopor perubahan sosial, dan karena itu lebih responsif terhadap masalah sosial, sehingga bersikap kritis. Sedang maha siswa non-aktifis beranggapan mahasiswa bukan pelopor perubahan sosial karena tugas utamanya adalah studi. Meski demikian tembok pembatas tersebut semakin tipis akibat silang kegiatan, terutama dalam minat dan bakat. Dalam situasi tertentu, bipolarisasi juga cair, sebagaimana dalam kasus anti-SDSB (Nopember 1993).

Gerakan aksi protes yang dilakukan oleh para aktifis itu, dengan membentuk budaya tandingan sebagai simbol oposisi karena terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan dengan premis-premis tatanan ideal dan modern. Misal kasus Malari (1974), berkembang pemikiran model pembangunan ekonomi dan politik yang sejajar, serta dalam gerakan 1977-1978 yang menuntut proses politik sebagai kontrol terhadap pembangunan.

Dalam perkembangannya protes tersebut berkembang karena menyatu dengan tuntutan perubahan struktural secara luas. Misal tema penggusuran tanah rakyat untuk lapangan golf di Bogor, Kedung Ombo, Nipah, UULLAJR atau persoalan SDSB, berkembang menjadi tema perubahan struktur ekonomi nasional yang lebih mengacu keadilan, pemerataan dan peningkatan usaha rakyat kecil.

Gerakan tersebut menuntut pengembangan fokus partisipasi politik, ekonomi dan kebudayaan dari proses sosial kelompok yang lemah dan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi proses politik secara langsung.

Akhirnya muncul pertanyaan, dimanakah tempat lokasi mahasiswa sebagai kaum intelektual di tengah masyarakat? Menurut *Brym* (1993), kedudukan tersebut berubah-ubah karena ikatan kaum inte lektual dengan kelas dan kelompok utama lainnya. Karena itu dipengaruhi pola mobilitasnya dalam struktur sosial yang berubah. Melalui identifikasi itu, karakter gerakan tidak dapat terjelaskan secara memadai jika analisisnya terpisah dari yang lain. Hal itu memperkuat pandangan bahwa lokasi struktural dan identifika si sosial mahasiswa tergantung pada kekuatan relatif kelompok utama pada titik waktu tertentu. Misal dalam 1966 mahasiswa berafiliasi dengan militer. Pada 1974 berafiliasi dengan teknokrat. Pada 1977 menolak dominasi militer. Yang terakhir, dekat dengan militer kembali.

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, keberadaan gerakan protes mahasiswa memiliki peran politik yang mengesankan. *Altbach* (1988) menyatakan bahwa hal itu sering merupakan penyebab efektif dalam merangsang perubahan sosial. Karena itu mahasiswa merupakan bagian dari persamaan politik yang konsisten, penting bahkan absyah.

Strategi dan Ideologi

Setiap pergerakan memiliki strategi yang berbeda antara angkatan satu dengan lainnya. Hal itu dipengaruhi oleh tingkat *kematangan ideologis* -nya. Ideologi dalam pergerakan mahasiswa dimaksudkan sebagai gagasan ideal terhadap modernisasi dan pembangunan. Gagasan demikian dalam cakrawala mahasiswa menurut *Raillon* (1985) merupakan suatu teori besar yang disusun sebagai strategi pembangunan yang akan mendorong modernisasi strategis yang saling terkait. Karena setiap gerakan hanya

sehingga mampu mengakhiri keterbelakangan dan mentalitas yang menghambat kemajuan.

Arbi Sanit (1989) membedakan atas 3 kategori. Pertama, penggagas ideologi yang disebut juga pencetus atau penafsir, yang menyusun dan mengembangkan ideologi mulai dari formulasi pemikiran tentang segenap aspek kehidupan masyarakat hingga menyusun tafsir dan rincian penggunaannya. Kedua, penerap ideologi, adalah warga masyarakat yang karena posisinya dalam kehidupan bersama berkemampuan untuk mengajak lingkungannya untuk mendukung dengan jalan memanfaatkannya. Ketiga, pendukung ideologi adalah masyarakat luas yang menerima ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak.

Dalam melihat gerakan protes mahasiswa, tolok ukur kematangan ideologis dapat dilihat dari fokus pergerakan. Apakah dalam melakukan protes itu juga mengemukakan pandangan pembaharuan yang bersifat pencetus ideologi ataukah hanya penerap atau pendukung. Namun hal itu tidak menyebabkan yang satu lebih unggul dari lainnya sebab kekuatan fungsional pergerakan mahasiswa adalah sebagai pendorong perubahan sosial. Karena itu peran ideologis hanya akan mempengaruhi sifat gerakan dan pengaruhnya terhadap intensitas perubahan dilingkungannya.

Gerakan aksi baru (1977-1978) berkembang dengan strategi *common issue* dan tema *adhoc*. Warisan pilihan strategi pembangunan serta demokratisasi politik dan ekonomi masih terus berlanjut. Namun ideologi pergerakan bukan lagi berdasar pemikiran teknokratik, melainkan refleksi pemikiran populis, menolak monopoli, serta menuntut reformasi politik.

Gerakan Pasca 1980-an

NKK dan Wawasan Almamater menggusur tradisi kepemimpinan mahasiswa. Penekanan terhadap pola normatif praktis yang kurang diimbangi teori besar, melahirkan paternalisme baru (*MT Arifin*, 1993a). Prosesnya yang lebih bersifat *systematically distorsed communication* itu memang menghasilkan suasana lokal harmonis, namun mengikis kekritisan berpikir. Akhirnya pergerakan 1980-an kehilangan nilai strategisnya karena "hilangnya" tradisi intelek tual dan "keterasingan" dari proses perubahan politik.

Hal demikian mempengaruhi perkembangan protes yang lebih berorientasi mikro, seperti diperlihatkan pergolakan kampus di Jateng dan DIY (1988). Mahasiswa terjebak masalah yang *isoterik*, utamanya SPP dan pergantian pejabat. Sedang protes juga berkembang melalui luar kampus terhadap kasus pembangunan region al, seperti penggusuran tanah. Namun hingga 1990, gerakan itu masih sporadis dan belum mampu mencetuskan perubahan sosial. Hal demikian menyebabkan mahasiswa belum tampil sebagai pencetus dan penggagas ideologi yang mewarnai pemikiran politik nasional.

Namun di tengah lemahnya kelembagaan mahasiswa pasca NKK, pusat-pusat gerakan justru berkembang secara heterogen. Dalam kampus, gerakan tumbuh dari penerbitan mahasiswa. Aksi lembaga kemahasiswaan mulai bangkit setelah terbentuk SMPT (1990).

Akhirnya, secara umum gerakan protes dapat dibedakan dalam tiga pola : pola reaksi yang lebih terkomtemplasi pada pemikiran, menjadi fokus kelompok studi; pola reaksi yang cenderung melaku kan aktifitas yang mempelajari dan merumuskan masalah sosial menjadi fokus LSM Mahasiswa; pola eksperimentasi komunitas khusus menjadi fokus Khalaqah. Ketiganya merupakan gerakan revitalisasi dengan fokus keilmuan, proses aksi maupun ideologis.

Melalui intensifikasi ketiga bentuk pola, akhirnya pada penghujung 1980-an pergerakan mampu mengembangkan pengaruhnya. Terutama dengan semakin meningkatnya hubungan gerakan itu dengan pelbagai kekuatan, terutama LSM. Kasus lokal yang terjadi di daerah Jabar, Jateng dan Jatim misalnya, berhasil menggerakkan aktifis untuk melakukan cetusan ideologis yang menekan kebijakan politik.

Akhirnya, pergerakan memiliki pola perkembangan sendiri dalam periodesitasnya. Meski demikian, pergerakan tidak akan memiliki pengaruh yang berarti manakala tidak dibentuk oleh jaringan antar faktor pecah apabila ketidakpuasan mahasiswa terjalin dengan keresahan masyarakat. Ketidakpuasan itu disusun berda sar ideologi pergerakan. Fungsi utamanya adalah sebagai *pressure politics* yang mendorong tumbuhnya perubahan sosial dan perubahan politik.

M. T. Arifin

Pengamat Sosial Budaya Solo, Mantan Ketua Dewan Mahasiswa IKIP Yogyakarta.

OPINI

PEMBANGUNAN SAMA DENGAN KEMISKINAN

Romo Mangunwijaya punya pengalaman di sebuah desa daerah Gunung Kidul. Dia bertanya apakah orang desa disitu hidup dengan cukup. Jawabnya, "Cukup pak, kalau tidak ada pembangunan". Kenapa? Soalnya kalau ada pembangunan maka pak lurah menyuruhnya membuat gapura, pagar desa atau melebarkan jalan, jelasnya.

Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci segala hal, yang diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material dan lebih celaka lagi pembangunan telah direduksi maknanya menjadi sekadar pertumbuhan ekonomi. Maka yang diukur adalah produktifitas masyarakat. Dalam bahasa ekonominya, *Produk Nasional Bruto* (GNP) dan *Produk Domestik Bruto* (GDP). Karena ukuran ini masih menyesatkan bila diperbandingkan antara GNP dengan jumlah penduduk, maka digunakan ukuran GNP per kapita atau GDP per kapita. Pada gilirannya ukuran ini belum juga menjamin adanya pemerataan pendapatan dalam suatu negara.

Jadi kita sudah mendapatkan dua tolak ukur pembangunan yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi (tingkat produktifitas) dan tingkat pemerataan pendapatan. Ternyata kedua parameter ini belum menja min bahwa pembangunan berhasil.

Karena itu tolak ukur pembangunan yang berhasil menjadi komplek. Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan terse but yakni keadilan sosial dan lingkunga yang berfungsi untuk melestarikan pembangunan supaya bisa berlangsung secara berkesi nambungan.

STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pengalaman pembangunan di Indonesia telah menampilkan tiga karakteristik utama yang mengiringi proses pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu : *pertama*, melesetnya teori merembes ke bawah, yang ditandai oleh kemiskinan massal yang menetap dan melebarnya jurang kaya-miskin.

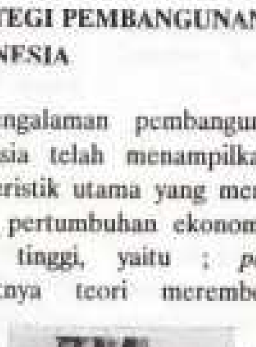

Kedua, kegagalan struktur negara modern didalam mewujudkan proses demokrasi rakyat, yang ditandai oleh menyempitnya basis kekuasaan politik, meningkatnya peran dan kepemimpinan militer dalam kehidupan sosial serta menajamnya konflik antara elit penguasa dengan rakyat. *Ketiga*, meningkatnya ketergantungan luar negeri secara ekonomis, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya hutang luar negeri serta implikasinya terhadap kehidupan ekonomi nasional dan politik luar negeri.

Karena keterkaitan ketiga hal tersebut maka sesuatu masalah, kemiskinan misalnya, bukan hanya masalah dalam negeri. Oleh karena itu model pembangunan Indonesia yang menerapkan *strategi trickle down effect* hanya mengakibatkan makin meluasnya kemiskinan massal ditengah-tengah kekayaan minoritas elit kelompok tertentu. Rostow dalam *The Stages of Economic Growth Non Commu nist Manifesto* menguraikan teori tentang proses pembangunan dalam lima tahapan yang berjalan secara *linear* yaitu masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan dan jaman konsumsi massal yang tinggi. Teori itu tidak mampu menjawab persoalan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga karena teori ini dibangun dari setting negara maju. Jelas teori modernisasi, yang diacu dalam pembangunan di Indonesia, merupakan *kapitalisme* terselubung yang berusaha menghapus jejak-jejak konflik kepentingan antar negara yang terwujud dalam wajah *imperalisme*.

Raul Presbisch yang mengkritik teori pembagian kerja secara internasional mempersoalkan kenapa negara-negara yang melakukan spesialisasi dibidang industri menjadi negara kaya sedang mereka yang memilih pertanian menjadi miskin. Presbisch menunjuk pada penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditi barang industri. Barang-barang industri menjadi makin mahal dibandingkan barang-barang hasil pertanian. Akibatnya terjadi defisit pada neraca perdagangan negara agraris bila mereka berdagang dengan negara industri. Dan defisit ini semakin melebar.

Gejala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, *pertama*, karena permintaan untuk barang-barang pertanian tidak elastis, artinya pendapatan yang naik tidak akan menaikkan konsumsi pan gan. *Kedua,*

negara industri sering melakukan proteksi terhadap hasil-hasil pertaniannya sendiri, sehingga menyulitkan arus ekspor negara agraris. *Ketiga,* kebutuhan akan bahan mentah bisa dikurangi akibat adanya penemuan teknologi baru yang bisa membuat bahan sintetis dan penemuan teknologi penghematan bahan bakar.

Lain halnya dengan barang industri, kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan barang industri namun tidak akan menaikkan secara berarti permintaan barang pertanian. Ini memperbesar ekspor dari negara industri ke negara agraris. Selain itu karena kemakmuran yang makin meningkat di negara industri serta kekuatan politik kaum buruhnya maka tingkat upah buruh di negara industri juga meningkat, yang akan menaikkan harga jual barang industri. Karena ongkos buruh meningkat sementara harga barang pertanian relatif tetap maka nilai uang negara industri pun meningkat. Untuk memutuskan lingkaran kemiskinan struktural ini maka *Presbisch* sampai pada pendapat *Negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi bila mau membangun dirinya.* Industrialisasi ini dimulai dari industri subtitusi impor yang untuk tahap awal mendapat proteksi negara.

Konsep Presbisch ini kemudian dikembangkan *Andre Gunder Frank* yang bekerja pada *Economic Commisions for Latin America* bersama Presbisch. Pada teorinya ada 3 komponen utama yang berp eran dalam pembangunan yaitu modal asing, pemerintah lokal di negara-negara satelit dan kaum borjuisnya. Pembangunan hanya terjadi di kalangan mereka sedang

rakyat banyaklah yang menjadi tenaga upahan. Maka ciri-ciri dari perkembangan *kapitalisme satelit* adalah kehidupan ekonomi yang tergantung, terjadinya kerja sama antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara satelit atau kolusi antara penguasa dan pengusaha, serta terjadinya ketimpangan antara kaya-miskin di negara-negara satelit.

Dengan demikian Frank menolak konsep Presbisch bahwa memotong lingkaran kemiskinan dengan memajukan industrialisasi lokal -yang berarti juga memperkuat borjuasi dinegara-negara satelit- bagi Frank adalah usaha sia-sia karena *borjuasi* tersebut tergantung pada modal asing. *Akumulasi modal* yang terjadi akan diserap keluar oleh kekuatan asing, tidak dikonsumsi atau diinvestasikan di dalam negeri.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi dinegara-negara satelit hanya akan menguntungkan kepentingan modal asing dan kaum borjuis lokal. Keuntungan ini tidak akan menetes kebawah dan kue pembangunan tidak akan pernah dibagi-bagi secara gratis. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang banyak orang yang tetap miskin tinggal di desa-desa sedangkan di kota-kota segelintir orang hidup dalam kemewahan. (**)

Hersy Yamanto
Ketua Umum HMI Cabang Surakarta

Model pembangunan Indonesia yang menerapkan strategi trickle down effect hanya mengakibatkan makin meluasnya kemiskinan massal ditengah-tengah kekayaan minoritas elit kelompok tertentu.

SM UNS TIDAK LAGI BERKELAMIN GANDA

Musyawarah Anggota III Senat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (SM UNS) telah melahirkan bentukan baru bagi lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dengan adanya pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam tubuh organisasi kemahasiswaan tersebut. Musyawarah yang digelar di penghujung bulan Mei lalu di Tawangmangu tersebut diikuti seluruh anggota SM yang terdiri atas unsur SMF, BPMF, HMJ dan UKM di lingkungan UNS.

Sebelumnya pertemuan yang diawali dengan stadium general tersebut mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan SM-UNS periode 1993-1994 yang diketuai Joko Wahyudi, yang mengungkap tentang masih minimnya kepedulian anggota terhadap eksistensi SMU meski kondisi ini tidak terlepas dari berbagai situasi ekstern yang berkembang.

"Kalaupun suasana SMU sedikit semarak hal tersebut lebih dikarenakan adanya jalur birokrasi baru dalam urusan keuangan kegiatan kemahasiswaan yang harus lewat SM UNS," tandasnya.

Dalam evaluasi laporan peserta musyawarah banyak menyoroti tidak adanya lembaga legislatif sebagai badan kontrol bagi pelaksanaan kegiatan SMU. Dalam kondisi itu akhirnya SM UNS seperti "berkelamin ganda" karena harus menjalankan fungsi lembaga legis latif dan eksekutif sekaligus.

"Fungsi ganda tersebut justru membuat SM UNS sering terjebak dalam kegiatan yang lebih bersifat praktis-operasional. Padahal semacam kegiatan operasional itu seharusnya menjadi jatah bagi SMF," kata Mas'ad, ketua BPM FISIP.

Atas dasar evaluasi tersebut, peserta musyawarah kemudian sepakat untuk mempertegas fungsi SM UNS sebagai lembaga legislatif dan membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa UNS (BEM UNS), yang diperkuat dengan penetapan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga SM UNS dan perangkat aturan lainnya.

Nantinya SM UNS akan lebih mengkonsentrasikan diri sebagai lembaga perwakilan mahasiswa di tingkat universitas yang akan menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Musyawarah tersebut juga memilih Tatang Badru Tamam (FE) dan Nur Lahamudin (FH) masing-masing sebagai Ketua SM UNS dan Ketua Umum BEM UNS periode 1994-1995. (PBL)

DANGEROUS AREA DI UNS FAIR 94

Bertepatan dengan Dies Natalis UNS ke 18 digelar berbagai ragam acara untuk menyemarakannya, diantaranya yang sempat tertunda adalah UNS Fair 94. Selain pameran juga digelar bermacam lomba seperti lomba karaoke, melukis anak-anak, panjat pinang, baca puisi, dan tarik tambang, yang berlangsung dari 3 - 8 Mei lalu. Suguhan gratis bagi masyarakat menengah ke bawah tersebut, sesuai dengan motto UNS Fair Pestanya Rakyat Solo, diantaranya pentas dangdut, rock, layar tancep dan kesenian tradisional.

Salah satu kreasi yang biasa disebut dengan Experiment Art dari mahasiswa seni rupa UNS menyoal masalah PLTN. Secara simbolik ditunjukan prosesi pembangunan PLTN serta bahaya-bahaya yang ditimbulkannya. Untuk menggambarkan situasi yang lebih lengkap dibeberapa tempat dibuat papan peringatan 'Dangerous Area' dan reaktor nuklir art yang unik.

Dangerous Area tersebut menjadi bertambah lengkap ketika stand Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI) menyajikan publikasi tentang bahaya reaktor nuklir yang disampaikan lewat tayang video, brosur-brosur dan foto-foto kecelakaan nuklir Chernobyl.

Mereka menggugat otonomi kampus

LINTAS KAMPUS

Menurut Wahyu "Perot" Susilo, staf litbang GIAT, "Layanan yang diberikan merupakan upaya pemerataan informasi tentang PLTN secara berimbang. Karena selama ini lebih banyak diinformasikan perihal keuntungan PLTN sedang kerugian-kerugiannya tidak pernah diekspos." (byt)

MENGGUGAT OTONOMI KAMPUS

Mahasiswa Solo tidak loyo! Otonomi kampus yes, Interbensi No! Tegakkan kebebasan akdemik! Demikian bunyi beberapa poster yang digelar oleh Komite Mahasiswa Penegak Otonomi (Kompeni) saat menggelar aksi mimbar bebas memperingati Hari Kebangkitan Nasion al 20 Mei lalu. Aksi tersebut juga boleh dikata sebagai kebangkitan mahasiswa bila dilihat dari tampilnya wajah-wajah baru.

Aksi terlebih merupakan respon mahasiswa UNS terhadap pencekalan Emha Ainun Nadjib dalam diskusi budaya yang diadakan Fakultas Sastra seminggu sebelumnya. Menurut beberapa mahasiswa yang memelopori Kompeni, "Pencekalan tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi aparat terhadap kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kebebasan akademik."

Aksi itu juga dibarengi dialog dengan pimpinan universitas dipimpin Ymt. Rektor Prof. Haris Mudjiman, yang diwakili oleh 10 orang utusan Kompeni. Sayangnya dialog tersebut tertutup bagi pers.

Dugaan Kelompok Mahasiswa Anti Sensasi (Kompas) bahwa aksi 20 Mei sebagai aksi sensasional ternyata tidak terbukti karena pada awal Juni Kompeni mengadakan diskusi masalah otonomi kampus di Fakultas Sastra, yang mengundang Drs. Sudarmono SU. Yang jelas menurut juru bicara Kompeni, "Kita tidak cari sensasi, karena itu berarti menodai demokrasi dan otonomi itu sendiri." Ya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. (byt/**)

SENI RUPA UNS UNJUK GIGI

Dikenal tidaknya prestasi seuatu kelompok salah satunya ditentukan dengan publikasi yang intens. Hal ini mengilhami Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR) UNS untuk menggelar Pameran Total '94 selama lima hari di penghujung Mei lalu.

Menurut Ketua KMSR Total '94 ini juga sebagai ajang unjuk gigi atas prestasi jurusan seni rupa, "Ini untuk menguatkan keinginan merealisasikan Fakultas Seni Rupa di UNS," kata Anton Rosanto.

Digelar di Auditorium UNS pameran menampilkan sejumlah karya mahasiswa dan alumni seni rupa, dalam bidang seni kriya, patung, desain interior, desain tekstil serta komunikasi visual.

Selain pameran, Total '94 juga menampilakan eksperimen art, workshop dan diskusi tentang prospek dan peran seni rupa. Menurut rencana pameran serupa akan diadakan setiap 2 tahun sekali. (nh/byt)

SUKSESI DI NURUL HUDA

Demam suksesi dilembaga kemahasiswaan juga melanda Jamaah Nurul Huda UKMI UNS. Penghujung Mei lalu telah digelar musyarawarah umum yang mendengarkan LPJ, memilih pengurus baru dan menyu sun program kerja. Musyawarah tersebut akhirnya memilih Banu Witono (Fak Ekonomi) sebagai Ketua UKMI periode 1994/1995.

Disamping itu Jamaah Nurul Huda juga mengadakan Gelar Muharram 1415 H, yang diantara disemarakkan dengan training pembina TPA, bursa muslimah, training wirausaha dan bakti sosial yang merangkum kegiatan khitanan massal, pengobatan gratis pengajian akbar dan pasar murah. Gelar Muharram diakhiri dengan seminar yang menampilkan Amien Rais. (nh)

Happening art Mahasiswa seni rupa

UNIKDOT

KIRI SEMUA

Sewaktu main kerumah teman, ada keganjilan yang menarik. Dirumah kontrakan itu ada tiga sandal jepit, anehnya tidak ada yang sebelah kanan alias kiri semua. "Kita khan kelompok mahasiswa yang concern terhadap masalah kerakyatan", komentar temanku. Oalah maksudnya, kelompok mahasiswa sekarang khan dicap "kekiri- kirian", maka biar lengkap ya pakai sandal "kiri semua". Siapa menyusul ? **(budiyanto)** ***

KOMPENI BAIK HATI

Kompeni, bagi orang Indonesia selalu diidentifikasikan dengan penjajah pada masa kolonial. Tetapi lain yang terjadi di UNS. Kompeni telah dipelesetkan menjadi kelompok pembela demokratisasi kampus, lengkapnya "Komite Mahasiswa Penegak Otonomi". Ketika menggelar aksi mimbar bebas di boulevard seorang mahasiswa berkomentar "Kalau Kompeni jaman dulu adalah penindas dan penjajah, maka kompeni jaman sekarang adalah penegak demokrasi". Wah, Kompeni jadi baik hati ya..... **(budiyanto)** ***

Ketua SMPT Tampang Supir

Untuk keperluan melayat, SM UNS terpaksa mencari pinjaman mobil. Usaha sejak pagi itu baru membuahkan hasil 3 jam kemudian. Ketika mobil yang ditunggu datang, langsung dipenuhi para pelayat dan siap berangkat. Tunggu punya tunggu, nyaris seperempat jam mobil nggak juga berangkat meski penumpang sudah duduk manis sambil kepanasan. Usut punya usut, supir kendaraan dinas itu ternyata nggak ada.

Kontan semua bubar sambil menggerutu alang kepalang karena sudah dibanjiri keringat plus sesak nafas. Ditengah kemangkelannya seorang rekan menggerutu, "Sialan tuh supir, kayak si baju kuning yang gemuk itu lho supirnya".

Usut lagi, si baju kuning yang ditengarai sebagai supir yang melarikan diri ternyata sang ketua SMU demisioner. Wah, punya tampang supir nih yee ...

Makanya buat ketua SMU terpilih, usul supaya segera mengu mumkan tampangnya, biar ngga terjadi 'pelecehan' lagi. ***

TAKUT JUGA

Dalam suatu audiensi seusai melakukan aksi mimbar bebas, sepuluh orang mewakili peserta aksi berdialog dengan rektor. Di tengah-tengah dialog, tiba-tiba seorang karyawan menyodorkan daftar presensi untuk diisi nama lengkap dengan nomor induk dan fakultasnya.

"Gimana, kok disuruh ngisi presensi segala. Jangan-jangan kita akan di black list," bisik seorang anggota delegasi mahasiswa. "Biasanya presensi itu kalau ada konsumsinya, ini mana?" sambungnya.

Dan ketika dialog usai, hal itu ditanyakan kepada pejabat bersangkutan "Pak, nggak diapa-apakan tokh?." Eh, takut juga ya... **(iyant/bn)**

Buku Pegangan Kuliah

Doni : "Mengapa perpus kita langka dari kunjungan mahasiswa?"

Tari : "Gampang itu, kita kan udah punya BPK, ngapain usil kesa na.

Doni : "Salah, bukan itu sebabnya

Tari : "Karena pustakanya terbitan tahun'66!"

Doni : "Bukan juga, sebabnya di perpus ada tulisan "HARAP TENANG" yang nggak relevan demo OTONOMI MAHASISWA

Tari : "Ngawur kamu!!."

(nurul)

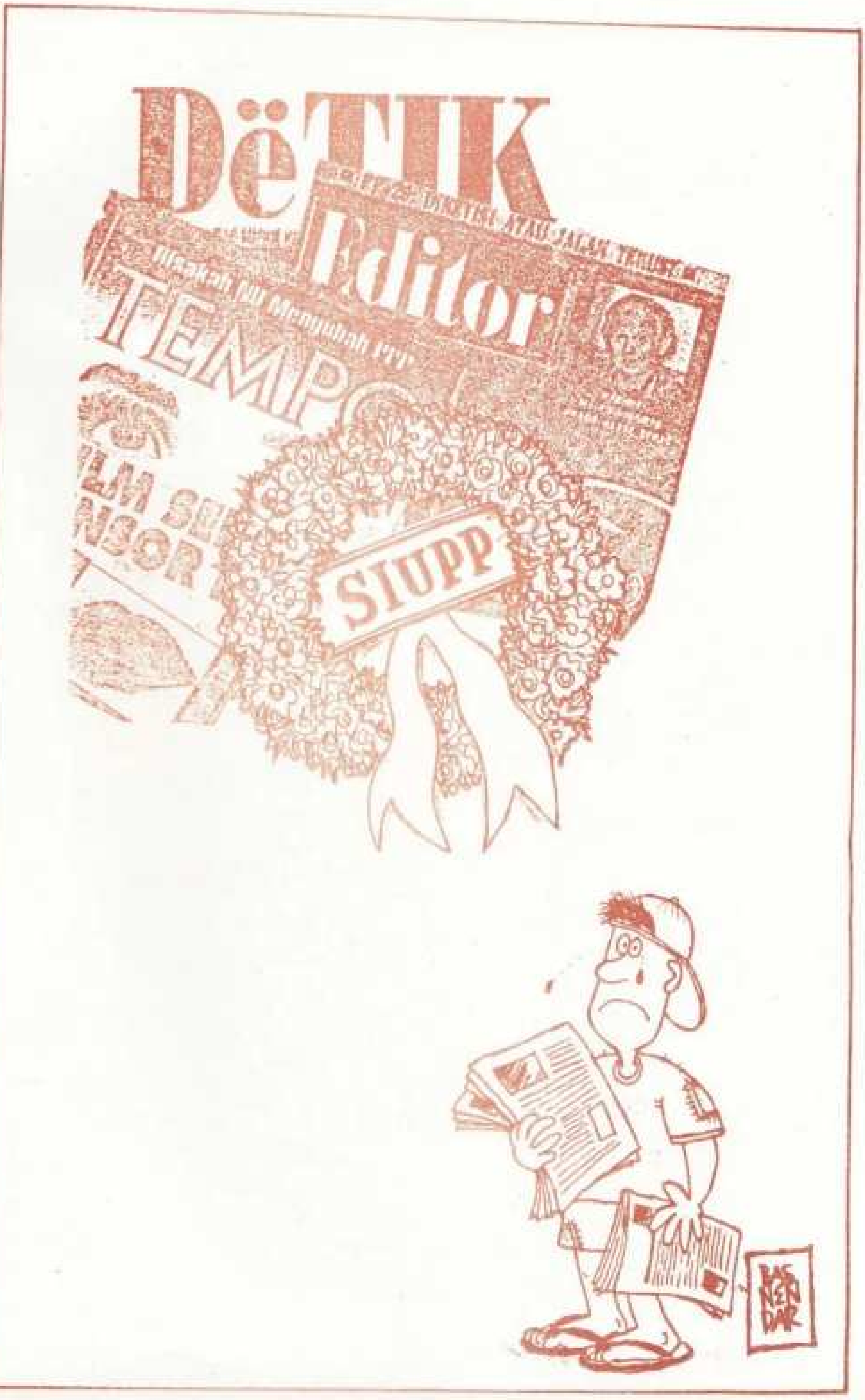

DëTIK
Editor
TEMPO
SIUPP

SRIWEDARI" SOLO
Lebih Perlu Taman
Daripada
MALL
Dipersembahkan oleh Majalah KENTINGAN bersama dengan GITA PERTIWI
(Ekological Studies Programme) dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia